

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 20
Agustus 2020



BANGKIT UNTUK



INDONESIA
MAJU



TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widiastuti

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati,
Annisa Bonita P.

Reporter:
Patricia Samantha S.
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Bajak Pandemi

Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang *hang*. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan *re-start*, harus melakukan *re-booting*. Pernyataan nan getir dari seorang Presiden pada Jumat, 14 Agustus 2020, dengan mengenakan pakaian adat Sabu NTT, Presiden Jokowi menyampaikan pidato tahunan pada Sidang MPR dalam rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan Presiden tentu tidak berhenti di situ. Suaranya cukup lantang ketika sampai pada frase ini : Ini saatnya bagi kita untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan besar, menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Indonesia Maju adalah cita-cita kita bersama. Kita telah mencapai Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita harus mengisi kemerdekaan dengan beragam aksi dan prestasi untuk mencapai Indonesia Maju. Indonesia Maju bukanlah suatu hal yang mustahil diraih, mengingat negara ini sudah memiliki modal yang cukup. Modal dasar yang dimiliki saat ini setelah Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai negara maju yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-5 di dunia dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketiga, letak geografis, di mana Indonesia

memiliki posisi strategis di jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung benua Asia-Australia.

Namun, upaya mencapai Indonesia Maju itu kini mengalami tantangan yang sangat serius akibat kehadiran Virus Corona (SARS-CoV-2). Sekali lagi, kita perlu ingat bahwa ini bukan virus biasa. Wabah bernama resmi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini sangat mematikan. Penyebarannya begitu cepat karena bisa ditularkan lewat berbagai media, makhluk hidup maupun benda mati. Memperhatikan penularannya yang sangat cepat, angka kematian yang begitu tinggi, dan daya rusak yang amat besar terhadap perekonomian, berbagai negara kini telah menabuh genderang perang terhadap corona. Indonesia pun berada dalam situasi perang melawan corona. Sebagaimana perang, setiap orang harus tunduk pada komando pemimpin, fokus pada satu tujuan, dan bertempur bersama untuk mengalahkan corona.

Presiden Jokowi mengingatkan kita bahwa masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Secara tegas Pak Presiden menyampaikan bahwa target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis, tetapi juga melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Presiden menutup pidatonya dengan kalimat pamungkas: "Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan."

Kami mencatat, hari itu pidato Presiden Jokowi menjadi *trending* di perbincangan media sosial, terutama di Twitter. Kata-kata "Kita harus bajak momentum krisis ini" menjadi perbincangan hangat warganet. Redaksi Majalah Kominfo Next merangkul semangat "Membajak Pandemi" yang disampaikan Presiden kita ini melalui liputan yang dikemas untuk Edisi Agustus 2020 ini.

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif Menteri

6 Rak Buku

8 Kominfopedia

10 Teknologi & Gadget

14 Kabar dari Istana

40 Liputan Utama

56 Photo Essay

64 17-an ala ASN

76 Opini

84 Liputan Khusus

94 Portal Kominfo

106 Sorotan Media

Garda Terdepan Nan Disiplin

September ini rupanya tak seceria lagu Vina Panduwinata. Harus diawali dengan *lock-down* total kantor Kominfo di Merdeka Barat. Praktis sudah di semua bangunan dan ruangan di kompleks ini terdapat teman-teman kantor kita yang positif dalam uji *swab* COVID-19. Sampai 1 September ini berarti sudah 35 orang yang terjangkit. Angka yang sangat mencemaskan.

Namun tentu kita sudah sangat siap untuk kondisi-kondisi krisis seperti ini. Sudah hampir setengah tahun kita harus mengganti kebiasaan-kebiasaan lama dengan protokol-protokol baru pencegahan, yang pada prinsipnya adalah menjaga jarak dan menjaga kebersihan.

Memang posisi kita tak mudah dalam menghadapi krisis pandemi ini, terutama jika menyangkut lingkup pekerjaan yang harus berhadapan dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sektor pengabdian kita, pos, telekomunikasi, dan penyiaran, merupakan sektor yang sangat penting peranannya untuk tetap memfasilitasi terselenggaranya kehidupan sosial dan mendorong laju produktivitas ekonomi agar tak berhenti di tengah jalan.

Oleh sebab itu, saya menyurat kepada pihak-pihak terkait untuk memberi pengecualian kepada staf dan pejabat Kominfo yang secara terpaksa harus dengan melakukan perjalanan luar kota atau berhadapan dengan aturan PSBB untuk menyelesaikan tugasnya. Tentu saja mereka harus mengantongi surat tugas resmi dan secara ketat mengikuti protokol kesehatan.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta melalui Pergub DKI No 7 Tahun 2020 pasal 5 memberikan pengecualian khusus kepada 11 sektor bisnis, termasuk sektor teknologi informasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut selengkapnya adalah: kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar-utilitas publik, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta industri kebutuhan sehari-hari.

Konsekuensinya, kantor kita tetap harus secara ketat mengikuti aturan masuk kerja sesuai dengan PSBB, yang banyak mengharuskan untuk bekerja di rumah. Namun pada saat yang sama juga harus tetap menyelenggarakan layanan kepada masyarakat yang justru makin meningkat di masa pembatasan sosial ini. Belum lagi kita tetap harus merawat dan membangun infrastruktur dan ekosistem TIK di seluruh penjuru Tanah Air.

Tak ada pemerintahan di dunia ini yang benar-benar siap dan mempunyai formula yang cespleng saat krisis COVID-19 meruyak. Semua mengambil keputusan yang tidak sempurna karena kasusnya sangat istimewa dan tanpa preseden. Pemerintah RI sendiri telah mengambil jalan yang tidak mudah untuk mengatasi pandemi ini, yaitu jalan tengah antara mitigasi krisis medis dan ekonomi. Untuk menghindari lumpuhnya ekonomi, pembatasan berbagai aktivitas sosial, seperti bekerja, belajar, dan beribadah ditetapkan secara besar-besaran, namun tidak ditutup secara mutlak sama sekali.

Ada sektor-sektor yang mendapat "kehormatan" sekaligus amanat untuk bisa beraktivitas. Mereka terutama adalah sektor yang berkaitan langsung dengan penanggulangan pandemi, yaitu kesehatan, juga sektor yang harus tetap berusaha menjaga agar roda perekonomian tidak mandek. Telekomunikasi adalah salah satu sektor tersebut.

Untuk itu, saya ingin mengapresiasi sekaligus mendoakan keselamatan dan kesehatan para pejabat dan staf di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terus bergerak melayani

masyarakat dalam masa sulit ini. Saya ikut bersedih dan terharu menghadapi kenyataan bahwa di antara mereka bahkan ada yang terpapar COVID-19 karena aktivitasnya. Teriring doa saya agar semua segera pulih seperti sedia kala.

Kominfo menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya bersama bangsa ini menanggulangi pandemi COVID-19, setidaknya dalam dua hal. Pertama, dalam fungsi sebagai aparatur informasi dan komunikasi publik, Kominfo dituntut untuk dapat menyebarkan informasi yang sah, menyamakan persepsi masyarakat, dan kemudian mengonversinya menjadi gerakan bersama dan serempak untuk melawan COVID-19. Kedua, sebagai regulator dan fasilitator sektor teknologi informasi dan digitalisasi, harus dapat menjamin berlangsungnya layanan secara stabil dan merata di seluruh Tanah Air.

Kita telah menyaksikan bersama bahwa justru dalam masa krisis ini, teknologi informasi dan komunikasi digital, menjadi tulang punggung utama untuk menyambung ketahanan bangsa ini. Teknologi digital dimanfaatkan untuk pengolahan data kesehatan, komunikasi krisis, dan yang paling fenomenal adalah pemanfaatannya untuk penyelenggaraan kontak atau pertemuan secara virtual. Berkat digitalisasi ini kita dapat sukses menyelenggarakan pilar penting protokol kesehatan, yaitu mengurangi kontak fisik dengan menerapkan social distancing.

Namun demikian, kita sudah banyak menyerempet-nyerempet risiko dengan banyaknya kasus positif COVID-19 di kantor kita. Maka tak ada alasan lagi untuk kendor terhadap protokol kesehatan yang sebenarnya sederhana dan sudah berbulan-bulan kita "latih".

Kuncinya hanya ada pada kedisiplinan. Kita boleh menjadi salah satu garda terdepan, namun hendaknya juga menjadi garda terdisiplin.

Salam sehat.

“ Kita boleh menjadi salah satu garda terdepan, namun hendaknya juga menjadi garda terdisiplin. ”

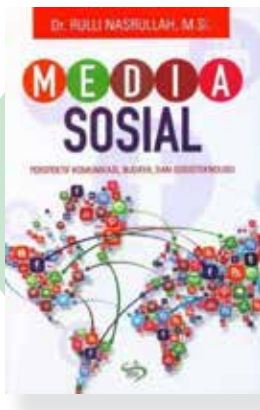


Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Rak Buku



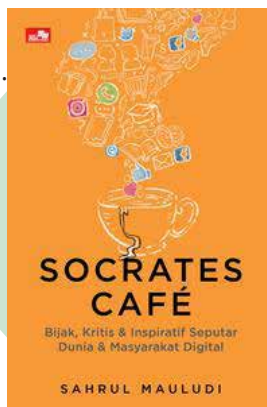
Penulis :
**Dr. Rulli Nasrullah,
M.Si.**

Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, media sosial juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, *public relations*, dan pemasaran.

Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh akademisi Indonesia yang khusus membahas tentang media sosial secara teori maupun praktik. Berisi tentang teori-teori media sosial, jenis-jenis media sosial, implikasi media sosial, budaya digital di media sosial, hukum dan etika di media sosial. Dilengkapi dengan beberapa data dan contoh sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para akademisi, praktisi, dan mereka yang tertarik pada kajian di bidang Ilmu Komunikasi, Pemasaran, *Public Relations*, Jurnalisme, Sosial, Budaya, maupun Politik.

Rak Buku



Penulis :
Sahrul Mauludi

Socrates Cafe : Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital

Buku ini mencoba untuk mengkaji dan mempertanyakan secara kritis beragam persoalan yang muncul dalam masyarakat digital; mengajak pembaca untuk selalu bertanya dan bersikap kritis terhadap penggunaan media digital dan beragam konten yang tersaji di internet; bersikap kritis terhadap kebebasan dan pilihan pribadi; selalu bertanya apa manfaat dan tujuannya; selalu memiliki kesadaran dan tanggung jawab; membuat informasi menjadi pengetahuan (*knowledge*) dan menerapkannya menjadi kearifan (*wisdom*).



Rak Buku

Penulis :
Adami Chazawi
Ardi Ferdian

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi ITE membawa perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sebaliknya kemajuan teknologi ITE dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yg melawan hukum.

Buku ini membahas ke 20 jenis tindak pidana tersebut. dengan menggunakan pendekatan teoritis/yuridis berdasarkan ilmu/doktrin hukum dan pendekatan empiris. Dibahas secara mendalam dengan cara mengurai dan menjelaskan dari sisi yuridis dan emperis setiap unsur tindak pidana. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan sempurna mengenai semua aspek tindak pidana ITE. Oleh karena itu buku ini sangat berguna bagi praktisi dan pengamat hukum.



Rak Buku

Penulis :
Trias Kuncayono

Kredensial : Refleksi 130 Kisah Tentang Manusia dan Peradaban

Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari sebuah peristiwa. Keprihatinan mendalam atas merebaknya perang dan teror di berbagai negara, kekerasan atas nama agama, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga korupsi yang merugikan orang banyak, tidak pernah memadamkan asa untuk terciptanya perdamaian di bumi. Teladan kepemimpinan dari para tokoh yang memperjuangkan demokrasi, toleransi, dan kesetaraan, menyalakan pelita harapan akan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang menghargai kemanusiaan, dan memandang keberagaman justru sebagai kekayaan untuk saling melengkapi. Refleksi tersebut dapat dilihat dalam 130 tulisan yang termuat dalam buku ini, yang dipilih dari 175 tulisan dalam kolom Kredensial pada rentang waktu 8 Juni 2014 – 31 Desember 2017.



Rak Buku

Penulis :
Hermawan Kartajaya
Arman Hakim Nasution

Inovasi

Buku ini menguraikan bagaimana sebuah inovasi diciptakan, dikelola, diimplementasikan, dimonitor, dan diukur sehingga mampu memberikan *information dashboard* kepada para inovator untuk dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Inovasi menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 di samping kolaborasi. Inovasi dikenal dengan istilah hilirisasi yang secara prinsip melibatkan setidaknya 3 pemain kunci untuk bisa berunjuk kinerja, masing-masing adalah akademisi, pengusaha, dan pemerintah. Artinya, inovasi baru bisa efektif apabila mampu menyinergikan 3 unsur tersebut agar dapat mentransformasikan invensi menjadi sebuah inovasi.

Teknologi Komunikasi

Zaman Kemerdekaan Indonesia

Sumber: Dikutip sepenuhnya dari <https://www.maxmanroe.com/teknologi-komunikasi-yang-bantu-pejuang-merebut-kemerdekaan.html>

Pada tahun 1945, banyak catatan penting terkait Republik Indonesia ini. Tidak hanya mengenai momen Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi juga beberapa hal seperti berita kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik melawan sekutu dan pemberitaan kemerdekaan.

Berita kekalahan Jepang atas sekutu ini memang sangat penting bagi Indonesia karena para pemuda memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatakan Kemerdekaan RI. Pemberitaan Proklamasi Kemerdekaan ke daerah-daerah juga menjadi hal yang sangat penting karena dengan hal tersebut, maka banyak daerah yang kemudian mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka.

Teknologi komunikasi mengambil peran yang krusial kala terjadi peristiwa-peristiwa tersebut. Meskipun belum secanggih saat ini, para pejuang kemerdekaan memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyiarkan kepada seluruh dunia dan juga ke seantero negeri bahwa Indonesia telah merdeka. Apa saja teknologi komunikasi yang ada pada tahun 1945 dan mempunyai peran penting dalam kemerdekaan negara kita? Berikut ulasannya.

1. Radio



Teknologi komunikasi pertama di tahun 1945 yang mempunyai peran penting dalam kemerdekaan adalah radio. Berita kekalahan Jepang atas sekutu dalam perang Asia Pasifik pertama kali didengar oleh Sutan Syahrir melalui radio.

Melalui radio juga, Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang digemakan oleh Soekarno tersebar luas ke penjuru negeri. Ketika mendengar pasukan sekutu akan datang kembali ke Indonesia setelah mengalahkan Jepang, dengan alat teknologi komunikasi inilah para pejuang menyebarkan informasi dan propaganda guna memotivasi rakyat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Tidak hanya itu, ketika Belanda melakukan Agresi Militer dan menangkap para pemimpin Republik ini, dengan bantuan radio jugalah, para pejuang kemerdekaan menyampaikan informasi ke Rakyat Indonesia bahwa tidak terjadi kekosongan kekuasaan karena telah dibentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Revolusioner Indonesia) di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Ketika itu ada pemancar radio bernama YBJ-6 yang menyampaikan pesan dan berita bahwa Republik Indonesia masih ada, meski pemimpinnya ditangkap Belanda di Yogyakarta. Karena besarnya peranan YBJ-6 inilah maka kemudian pemancar radio tersebut disimpan dan dipamerkan di dalam museum perjuangan di Bukittinggi sedangkan dioramanya sendiri disimpan di Museum Telekomunikasi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

2. Telegram

Teknologi komunikasi di tahun 1945 yang juga mempunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan adalah telegram. Media komunikasi yang mulai dikembangkan sejak tahun 1809-an ini menjadi alat komunikasi jarak jauh yang paling favorit digunakan di zaman tersebut.

Dengan telegram, seseorang bisa mengirim dan menerima pesan pendek layaknya SMS dari jarak jauh yang (dikala itu) terbilang efisien dan efektif. Penggunaan telegram di wilayah Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 23 Oktober 1856. Saat itu telegram digunakan dalam pengiriman berita dari Batavia (Jakarta) ke Buitenzorg (Bogor). Mulai saat itulah kemudian telegram menjadi teknologi komunikasi yang sering digunakan para pejuang kemerdekaan Indonesia.



3. Telepon

Selain radio dan telegram, teknologi komunikasi di tahun 1945 yang mempunyai peran penting adalah telepon. Telepon sering digunakan oleh pemimpin Republik Indonesia tahun 1945 untuk melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah.

Telepon muncul pertama kali di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda pada Tahun 1882 yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Ketika itu, dengan izin konsesi diberikan selama 25 tahun, perusahaan tersebut membangun jaringan telepon yang menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok (Batavia). Namun, ketika masa konsesi berakhir, teknologi jaringan telepon ini dikuasai secara monopoli oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan membentuk Post, Telegraaf en TelefoonDienst.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di Tahun 1967, barulah lahir gelombang mikro lintas Sumatera dan gelombang mikro Indonesia Timur yang melengkapi program pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara. Pada tahun tersebut, telepon mengalami perubahan pada penggantian kawat tunggal yang kerap mengalami gangguan menjadi kawat sepasang dan sistem baterai sentral.



Sumber :
<https://www.maxmanroe.com/teknologi-komunikasi-yang-bantu-pejuang-merebut-kemerdekaan.html>

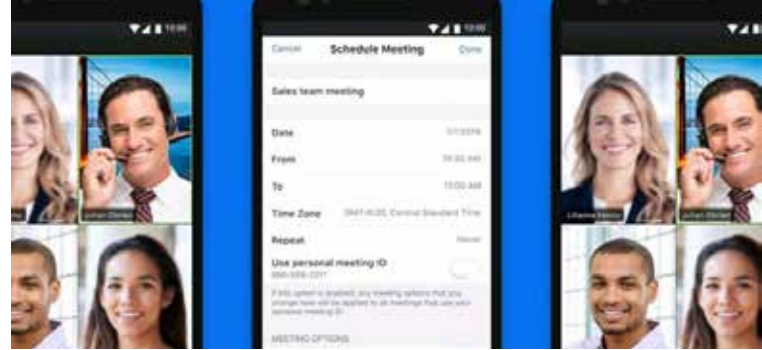
TEKNO LOGI & GAD GET

Hadirnya *pagebluk* COVID-19 membawa kebiasaan baru bagi masyarakat, terutama bagi para pekerja kantor dan pelajar. Untuk menjalankan *physical distancing* dalam upaya aman dari virus Corona, dan pada saat yang sama agar bisa tetap produktif dengan menjalankan aktifitas baik bekerja dan bersekolah, masyarakat memanfaatkan beragam program aplikasi yang tersedia di internet. Aplikasi ini biasanya berbasis aplikasi rapat virtual dengan fitur *video call*, *sharing* dokumen secara *live*, *chat*, *recording* dan berbagai fitur yang membuat rapat *online* ini selayaknya rapat yang dilakukan *offline*. Sobatkom, kali ini kita akan membahas 5 (lima) aplikasi rapat virtual yang bisa dimanfaatkan Sobatkom semua untuk menunjang aktifitas kamu selama WFH.

Zoom

Hadirnya aplikasi Zoom ditengah-tengah netizen tanah air terhitung baru. Sebelum adanya pandemi COVID-19, netizen jarang yang mengetahui apalagi menggunakan aplikasi yang ternyata sudah ada sejak tahun 2011. Aplikasi ini dikembangkan oleh para engineer dari Cisco dan WebEx yang berbasis di San Jose, California dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam komunikasi dan kolaborasi berbasis *people-centric cloud service*.

Aplikasi Zoom mampu untuk menyelenggarakan *video conference* hingga 1000 peserta dalam satu waktu. Namun, aplikasi ini tidak sepenuhnya gratis. Paket gratis pada aplikasi ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat dengan durasi hanya 40 menit. Sedangkan paket berbayar dari aplikasi ini bisa menyelenggarakan dengan durasi tidak terbatas dengan berbagai tingkatan sesuai kapasitas jumlah peserta yang bisa ditampung dengan harga mulai dari \$14,99. Walaupun sering diterpa isu tentang privasi dan keamanan data, namun jumlah pengguna aplikasi ini di Indonesia masih cukup banyak, terlihat dengan seringnya *event-event webinar* atau seminar daring yang memanfaatkan *platform* ini dalam pelaksanaannya.



CloudX

CloudX merupakan aplikasi yang dirilis oleh Telkomsel dengan tujuan untuk menjaga produktifitas para pekerja saat melakukan aktifitas *Work From Home (WFH)*.

Dengan menghadirkan fitur rapat virtual yang dinamakan CloudX Meeting, mengirim pesan ataupun telepon melalui CloudX Communication serta pelayanan pelanggan yang dikenal dengan CloudX Hunting Group. Jika dilihat dari target pasarnya, aplikasi ini lebih ditujukan untuk pengguna korporasi dibandingkan personal user. Aplikasi CloudX tersedia di beragam platform seperti Android, iOS, Windows serta MacOS.

Telkomsel yang juga merupakan salah satu operator seluler di Indonesia, menghadirkan aplikasi CloudX

25 Tahun

Bebas meeting virtual sampai 5 jam

CLOUDX Layanan Video Conference hingga 100 peserta.

TELKOMSEL

Paket CloudX on demand
Mulai Dari Rp **10rb**

Aktifkan dengan ketik
CloudX di chat Virtual Assistant

MyTelkomsel
Telkomsel.com
+62811 1111 1111

ini dengan *bundling* layanan datanya, jadi pengguna CloudX akan dibebaskan kuota data hingga 60 GB untuk *host meeting* dan 30 GB untuk peserta meeting. Aplikasi meeting di CloudX dapat menangani sampai dengan 100 peserta. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan CloudX tidak akan memerlukan adaptasi lebih jauh lagi dikarenakan CloudX memiliki *user interface* yang sangat mirip dengan aplikasi Zoom.

Whatsapp

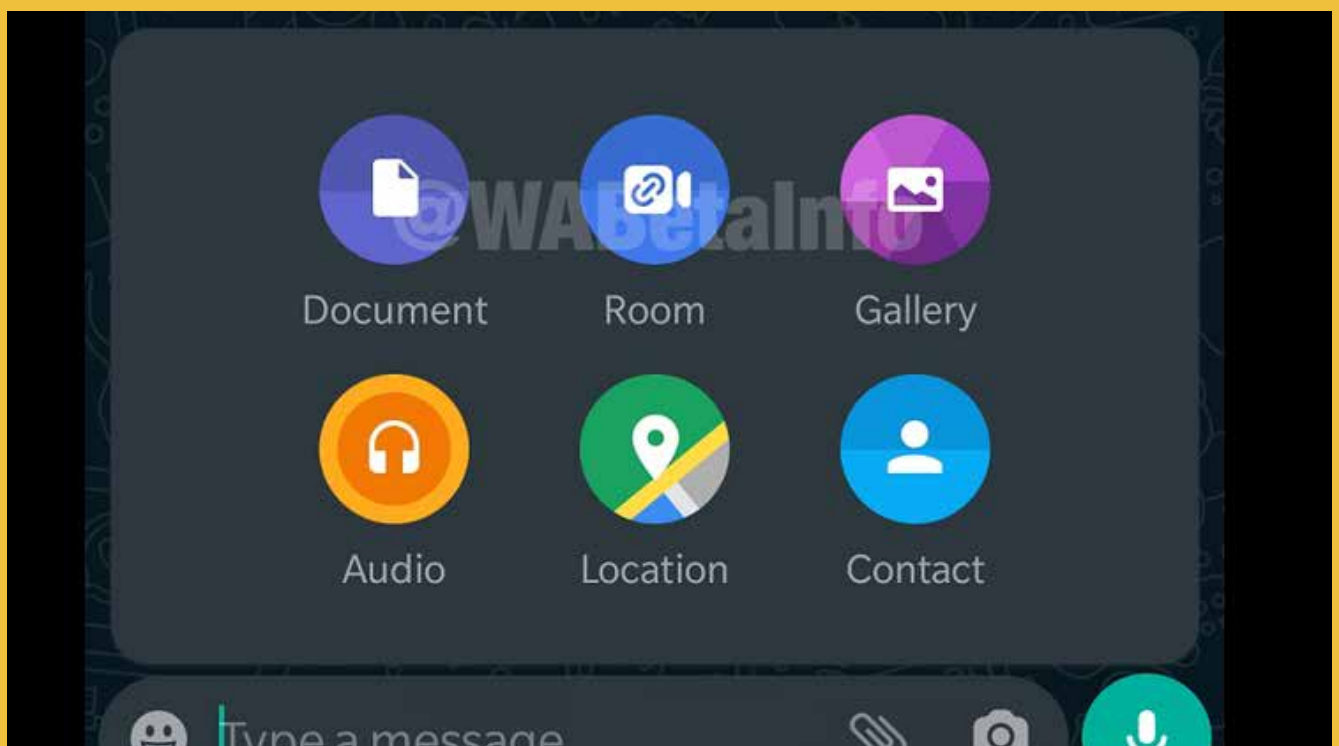
Siapa yang tidak kenal dengan aplikasi ini? Whatsapp seolah menjadi aplikasi wajib dan hampir selalu ada dan terinstal di sebagian besar gawai masyarakat Indonesia.

Betapa tidak, dari data yang dilansir oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* dalam *Digital Report 2019*, tercatat 83% netizen Indonesia merupakan pengguna Whatsapp. *Basic* aplikasi ini adalah instant messaging services atau aplikasi untuk pesan singkat. Kemudian hadir fitur untuk *video call* yang bisa digunakan sampai dengan maksimal 4 pengguna dalam satu panggilan.

Pada Bulan April 2020, Facebook Inc yang membawahi beberapa aplikasi populer seperti Facebook, Instagram dan juga tentunya Whatsapp, mengumumkan akan merilis Messenger Rooms yang merupakan fitur *video*



call yang digadang-gadang bisa menyaingi popularitas Zoom dengan kapasitas mencapai 50 peserta video call. Saat ini, fitur *Messenger Room* bisa ditemukan oleh pengguna di Whatsapp Android versi 2.20.163 ketika meng-klik icon 'lampirkan yang ada di sisi kanan kolom pesan.



Google Meet

Sejak didirikan pada tahun 1996 oleh Larry Page dan Sergey Brin, Google menjelma sebagai raksasa di industri internet global.

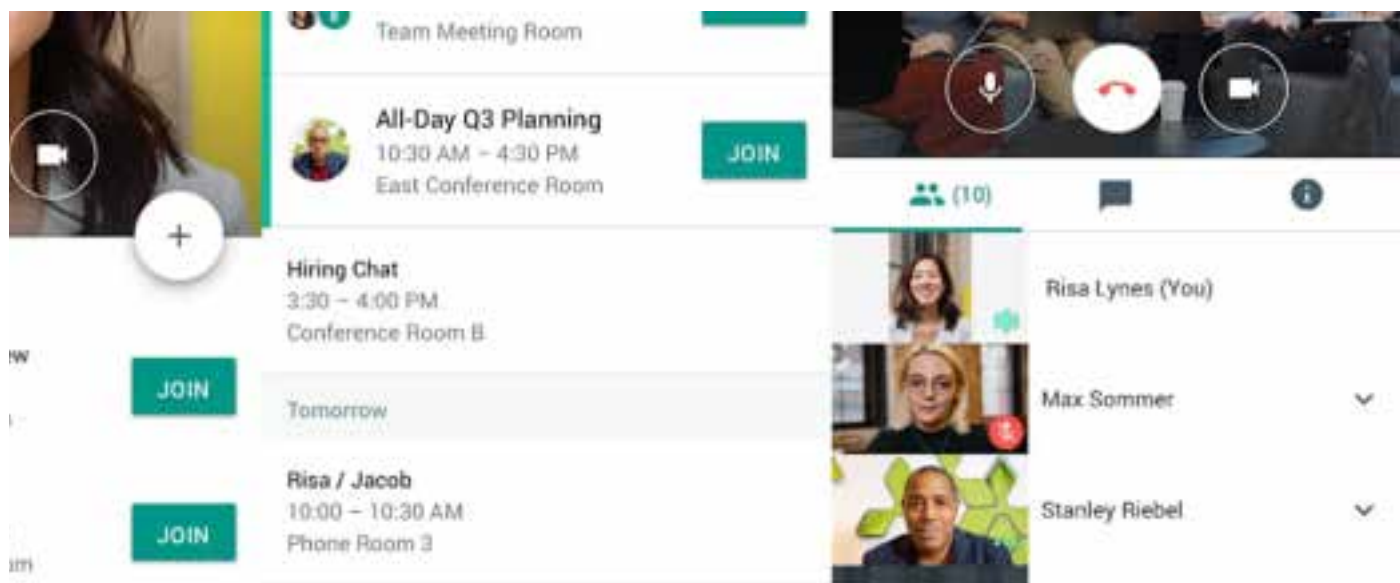
Dengan berbagai aplikasi multiplatform yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia, hadirnya Google Meet semakin menambah dominasi Google dikalahkan persaingan industri ini. Aplikasi besutan Google yang dahulu bernama Google Hangout ini mengandalkan fitur kepraktisan dimana untuk bisa menggunakan aplikasi ini, pengguna tidak perlu menginstall aplikasi apapun di *gadgetnya*. Cukup dengan memanfaatkan *browser* yang secara *default* sudah terinstall, pengguna bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dan tanpa berbatas waktu.

Hal lain yang menjadi fitur unggulan dari Google Meet yaitu konektifitas ke berbagai macam aplikasi Google lainnya seperti *Google Calendar*, *Google Mail* dan lainnya. Bahkan, jika Sobatkom yang mengandalkan layanan *G Suite* dari Google, maka aplikasi Google Meet ini akan menjadi aplikasi terbaik sebagai sarana rapat virtual. Dengan *user interface* yang sederhana, aplikasi ini akan sangat mudah untuk dipahami oleh pengguna baru sekalipun.



Your meetings

- 
Annual Budget Review
 10:30 – 11:30 AM
 Team Meeting Room JOIN
- 
All-Day Q3 Planning
 10:30 AM – 4:30 PM
 East Conference Room JOIN



Pidato Presiden Republik Indonesia

*Pada Sidang Tahunan MPR &
Sidang Bersama DPR dan DPD
dalam Rangka Hut Ke-75
Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia*

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma'ruf Amin;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla;

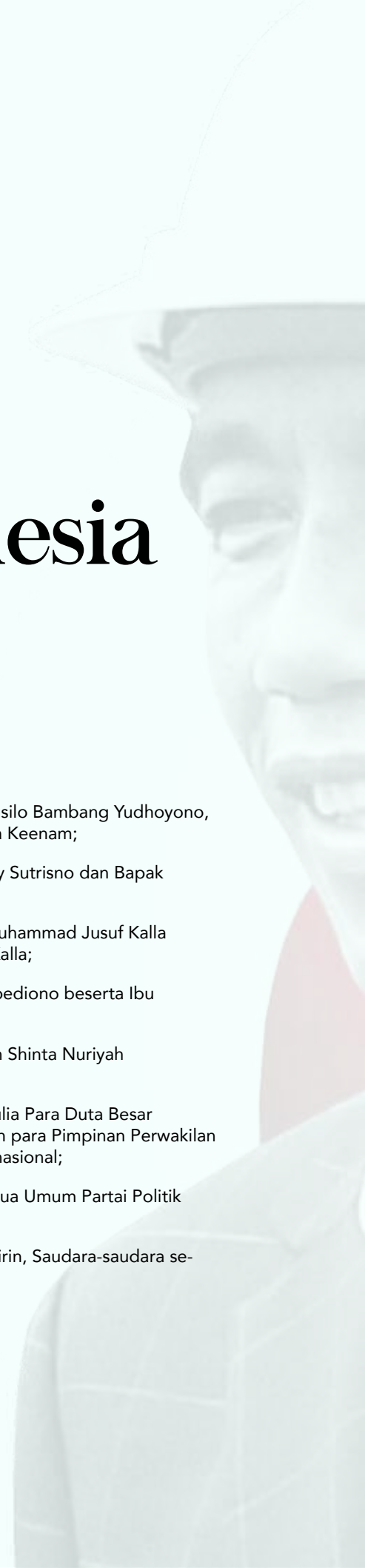
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati, Yang Mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir,

Yang saya hormati para hadirin, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,



Semestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong.

Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI.

Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan.





Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang *hang*. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan *re-start*, harus melakukan *re-booting*.

Semua negara mempunyai kesempatan *re-setting* ulang semua sistemnya. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.

Ini adalah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar.

Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara *Upper Middle-Income Country*. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju.

“

Ini saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan besar. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.

Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh

banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah.

Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program; menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.

Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi *smart short cut*. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan.

Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah.

Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran.

Petugas medis memeriksa kantong berisi plasma konvalesen dari pasien sembuh COVID-19 di Unit Tranfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Selasa (18/8/2020). Pengambilan plasma konvalesen pasien sembuh COVID-19 yang menggunakan alat apheresis bertujuan untuk membantu penyembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.



Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.

Saat ini sedang dikembangkan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kita

mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019.

Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar *diesel* yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.

Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi *metanol* dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.

Biji nikel telah bisa diolah menjadi *ferro nikel*, *stainless steel slab*, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai *lithium*. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai *lithium*, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.

Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk

mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi.

Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya.

Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa

dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.

Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang *click* dan menumpuk jumlah *like*, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.

Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, hadirin sekalian yang berbahagia,

Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.

Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasila sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.

Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik.

Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.

MPR dengan cepat membuat payung program baru "MPR Peduli COVID-19" serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita.

Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan





Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.

Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada *Independent Audit Advisory Committee* di bawah PBB.

Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.

Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.

Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim *ad hoc Tipikor*, dan calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.

Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan

elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.

Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.

Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 14 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO



Pidato Presiden Republik Indonesia

*Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah
Atas Rancangan Undang-Undang Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021
Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI*

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada

semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

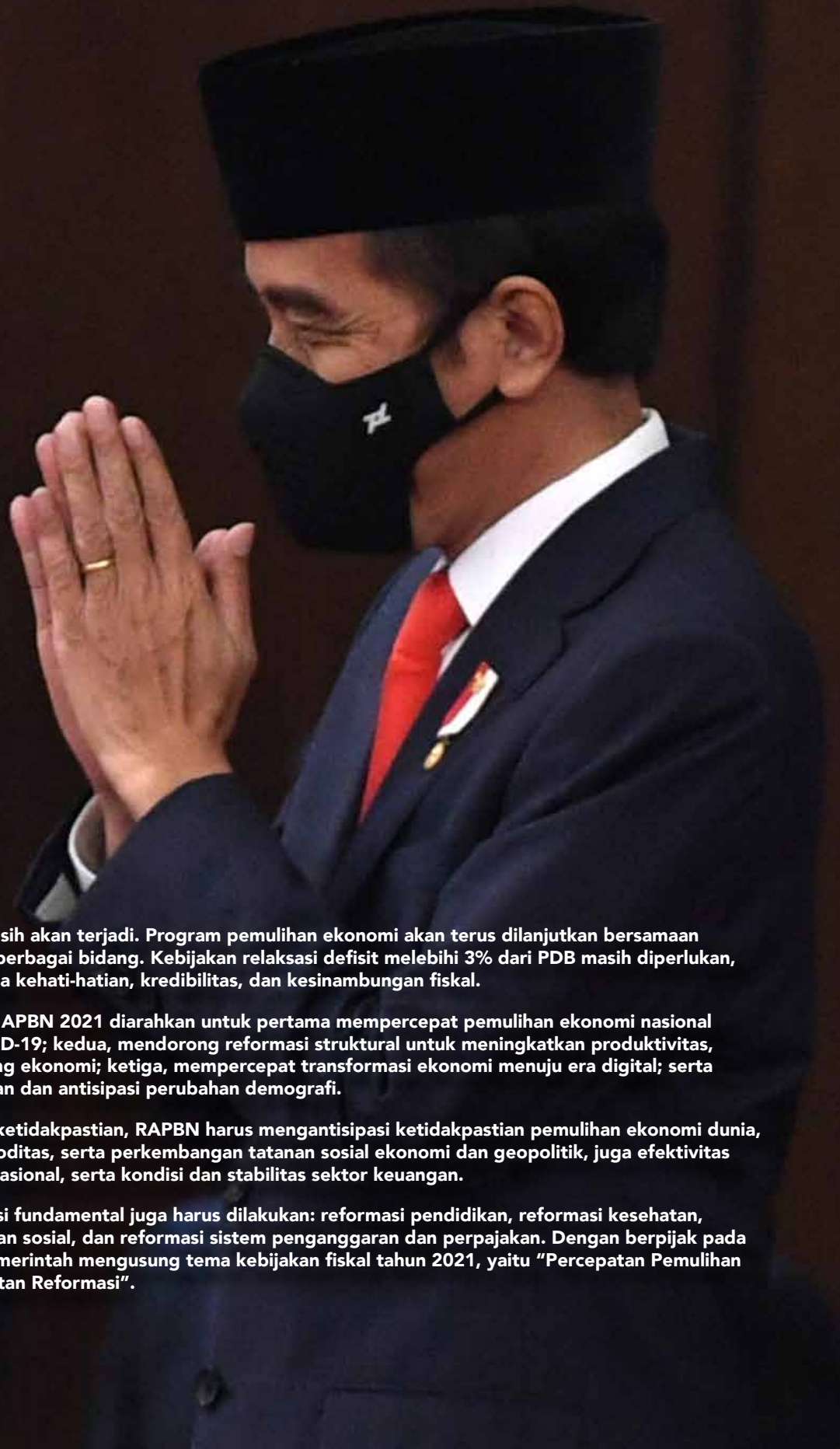
Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% PDB-nya, namun pertumbuhannya berkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6% PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5%. China mengalokasikan stimulus 6,2% PDB, dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya.

Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-undang No. 2 tahun 2020 antara lain memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama tiga tahun. Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB.

Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.

Hadirin yang saya muliakan,

Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global



maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.

Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".



Sejumlah pembeli antre membeli sembako di Pasar Rakyat Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/8/2020). Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi menyampaikan rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk empat langkah strategis yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta pemanfaatan danantisipasi perubahan demografi . ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz.

Hadirin yang saya muliakan,

Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar.

Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI,

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional; serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan, melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.



Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.

Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (*food estate*) untuk meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja; mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup



dan antisipasi *aging population*; penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Pembangunan pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; pengembangan aspek 3A: atraksi, aksesibilitas, dan amenities serta peningkatan pada 2P: promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.



Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk: Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBU.

“ Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk

(1) mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19;

(2) mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi;

(3) mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital;

(4) pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.



Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai. Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Pada tahun 2021, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan di antaranya: Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, *refocusing* dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019.

Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96% pada tahun 2016 menjadi 12,60% pada tahun 2019.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun.

Dari sisi perpajakan, Pemerintah

terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi.

Di sisi cukai, akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.

Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBPN antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan *lifting* migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas. Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBPN terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB.

Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan *countercyclical* dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga Pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama



Pekerja menyelesaikan kerangka sepeda di pabrik sepeda PT Insera Sena di Desa Wadungasih, Bunduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (3/8/2020). Produsen sepeda Polygon, PT Insera Sena menargetkan produksi 700 ribu unit sepeda tahun 2020 dengan komposisiimbang antara pasar domestik dan pasar ekspor. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.



dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Pembiayaan investasi juga akan dilakukan Pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk: Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi; Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan; Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi; Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan ridhonya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya

Jakarta, 14 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Refleksi HUT RI ke-75: Bersatu dan Bangkit Lawan Covid-19



**Menteri Komunikasi dan Informatika
Johnny G. Plate**

Sambutan Menkominfo melalui Wawancara
Bersatu dan Bangkit Lawan Covid-19
bersama Metro TV

Pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir, di saat yang sama kita melihat jumlah kasus positif terus meningkat baik di dunia dan secara khusus di Indonesia. Jumlah pasien COVID-19 juga terus naik, walaupun angka kesembuhan juga terus bertambah. Lantas ketika ditanya seberapa mengkhawatirkan situasi saat ini, perlu saya tegaskan bahwa pemerintah pasti khawatir atas situasi tersebut. Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semuanya, kepada bangsa kita untuk harus pulihkan kesehatan, di saat yang bersamaan tidak bisa memilih antara ekonomi dan kesehatan, ekonomi juga harus bangkit, jadi dua hal itu. Oleh karena itu, tema peringatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema **Bangkit Untuk Indonesia Maju**. adalah gerakan masyarakat, tidak saja pemerintah tapi keseluruhan komponen masyarakat. Inilah gerakan kegotong-royongan nasional.

Syarat utama untuk memutus rantai persebaran COVID-19 adalah melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan terus-menerus oleh seluruh masyarakat. Selama itu tidak dilakukan, potensi terjadi penularan besar sekali. Ukuran melebar dan membesarnya penularan itu dari mana? Pada saat pemerintah melakukan uji test COVID-19 atau *PCR test*. Saat ini, *PCR test* telah dilakukan cukup besar untuk ukuran kita yakni lebih dari 30 ribu *test*. Pada saat *PCR test* semakin banyak dan masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, maka potensi peningkatan kasus menjadi besar. Yang pertama harus dilakukan pemerintah yaitu menyembuhkan pasien COVID-19, itu menjadi target yang utama.



Narasi Tunggal dan Kunci Kedisiplinan Masyarakat



Bersatu
dan Bangkit

Pemerintah sangat serius dalam memulihkan kesehatan masyarakat selama *pandemic*. Jika kita melihat bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, masalah COVID-19 ini belum ada referensinya, ini hal yang sangat baru yang berubah setiap saat. Kebijakannya juga selalu disesuaikan dengan kekinian situasi, bukan saja Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Sama halnya dengan di Indonesia, kita menyesuaikan perubahan-perubahan itu sesuai dengan perkembangan. Tidak dapat dipungkiri, pada saat awal terjadi *pandemic*, komunikasi menjadi persoalan yang begitu serius, sehingga Bapak Presiden menetapkan harus ada narasi tunggal untuk menentukan pola komunikasinya. Sebelumnya, pola komunikasi tersentralisasi di Gugus Tugas dan masalah kesehatannya ada di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan satu narasi dalam melakukan komunikasi ke masyarakat. Tetapi, tetap saja pada saat dimana semua pejabat melihat partisipasi dan peran publik atau masyarakat begitu penting, semuanya ingin meyakinkan masyarakat tapi cara meyakinkan ini yang membuat bingung masyarakat.

Setelah belajar dari semua tahapan tersebut dan juga saling bertukar informasi dan pengalaman antar negara dan di internal pemerintah melalui komunikasi antar kementerian/lembaga, pemerintah mengetahui bagaimana harus mengatasi permasalahan ini. Diharapkan, dengan komunikasi yang lebih terarah, masyarakat bisa cepat dapat memahami, mempercayai dan melaksanakan pesan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena kunci sukses untuk memutus rantai COVID-19 yaitu kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin.

Memori Kemerdekaan & Kekuatan Gotong Royong

Momen Perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia, mengingatkan kita bagaimana di awal kemerdekaan bangsa kita bersatu begitu kuatnya melawan penjajah dan berhasil mempertahankan kemerdekaan itu. Saat ini, bangsa kita kembali dituntut untuk menggunakan kekuatan kegotongroyongan pada saat berhadapan dengan satu lawan, yaitu COVID-19. Kalau dulu lawan kita kolonialisme, sekarang lawan kita COVID-19. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jokowi meyakini betul kegotongroyongan adalah modal utama yang sangat kuat bagi kita. Begitu kita sebut kegotongroyongan untuk menghadapi musuh bersama, maka tidak bisa kerja hanya dari satu kelompok, melainkan seluruh kelompok juga harus bekerja sebagai bangsa.

Tantangan lain dalam menghadapi COVID-19 yaitu bagaimana mendorong kesadaran masyarakat. Kita harus sadar selain dampak pada aspek medis, terdapat pula dampak aspek non medis yang langsung berurusan dengan setiap orang, yaitu ekonomi. Di tingkat dunia, kontraksi ekonomi begitu luar biasanya. Banyak negara-negara besar di dunia, kontraksi ekonominya mencapai *double digit*. Indonesia sendiri di kuartal kedua juga terdampak, tapi karena kekuatan kita di dalam negeri, kontraksinya tidak sedalam seperti bangsa-bangsa lain. Hal ini juga wujud dari kekuatan kita di dalam negeri.

Memori

Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan itu? Tentunya dengan peran secara konkrit masyarakat. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Memakai masker memang tidak enak, tetapi untuk menghadapi COVID-19, masker menjadi prasyarat utama dan kita harus jadikan masker sebagai *lifestyle*, ini suatu pembiasaan, begitu juga dengan mencuci tangan. Mencuci tangan manfaatnya bagus tidak saja untuk mencegah penularan COVID-19 tetapi juga untuk mengatasi penyakit lainnya. Jaga jarak pun demikian, kita juga dituntut untuk disiplin, teratur dan antri.

Sebelum ada COVID-19, di Indonesia pada saat *check in* di bandara sudah salip-salipan ingin paling cepat. Begitu sampai di Singapura dan antri di imigrasi langsung tertib semuanya. Sebaliknya pun demikian, pada saat kembali di Singapura begitu tertibnya, begitu sampai di Indonesia mulai lagi. Intinya apa? Kita sebetulnya punya kemampuan tertib, punya kemampuan disiplin. Sekarang waktunya kemampuan disiplin dan tertib itu dipanggil oleh Ibu Pertiwi, mari kita gunakan itu sekarang untuk atasi COVID-19.

Masyarakat patron seperti kita selalu perlu ada contoh. Contoh pelaksanaan protokol kesehatan bahkan sudah langsung dicontohkan oleh Presiden. Setiap kali rapat dan komunikasi publik, Presiden selalu menggunakan masker. Rapat-rapat kabinet juga dilakukan secara virtual. Itulah contoh yang dilakukan, tapi dalam situasi seperti sekarang ini di mana kita menonton, membaca dan melihat dampak luar biasa dan susahnya pasien-pasien COVID-19 di televisi dan media, kita belum melihatnya secara langsung. Nah, saat sekarang ini dari

begitu banyak testimoni masyarakat harus bisa merasakan bagaimana susahnya pasien COVID-19, begitu dahsyatnya dan fatalnya yang terjadi di dunia ini. Bahkan petugas medis dokter dan perawat juga begitu banyaknya yang menjadi korban, ini masalah serius yang harus ditangani pula secara serius dan disiplin.

Karena ini serius, masyarakat juga perlu tahu. Pertama sayang diri kita sendiri, cara menyayangi diri kita sendiri terhadap pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Pada saat kita menggunakan protokol kesehatan secara disiplin orang per orang, maka yang pertama kita selamatkan setelah diri sendiri adalah lingkungan terdekat kita; keluarga langsung seperti suami, istri bahkan anak. Dengan demikian di lingkungan terkecil, tetangga-tetangga kita selamatkan, lebih besar lagi RT, RW, Kabupaten, Provinsi dan kita selamatkan negara kita, lalu demikian menyelamatkan dunia ini. Itulah panggilan kita saat ini.

Kemerdekaan



Pengembangan Vaksin

Sebelum berbicara terkait vaksin, perlu saya sampaikan bahwa semua langkah ditempuh secara bersamaan. Langkah protokol kesehatan diimplementasikan secara disiplin karena akan membantu kita semuanya. Di saat yang sama langkah kita berada kecepatan untuk menghasilkan vaksin. Saat ini persiapan-persiapan untuk vaksin sudah sampai di tahapan uji klinis. BUMN kita di bidang farmasi, Bio Farma juga sudah menyiapkan untuk memproduksinya. Masing-masing dari pengembangan vaksin ada tahapannya, tentu kita menginginkan yang paling cepat dulu yang bisa kita hasilkan supaya bisa langsung digunakan.

Disamping uji klinis, persiapan produksi juga dilakukan. Kapasitas produksi di Bio Farma sudah disiapkan dan siap untuk menghasilkan ratusan juta vaksin itu. Diharapkan pada akhir Desember nanti sudah bisa mulai

produksi, tapi tentu kita menunggu proses uji klinisnya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, dilihat dari perkembangan uji klinis, kita optimis bahwa akhir tahun ini kita bisa mulai memproduksinya. Tapi tentu tidak boleh mendahului tahapan-tahapan uji klinis, karena apa? Vaksin ini harus betul-betul mengikuti tahapan yang seharusnya. Kita ingin mendapatkan vaksin yang betul-betul bisa digunakan untuk kesehatan, dan tim pemerintah yang terlibat di dalamnya bekerja secara sungguh-sungguh dan serius, karena ini salah satu yang akan membantu, tidak saja Indonesia tetapi dunia secara keseluruhan.

Semua negara berlomba-lomba berkejaran dengan waktu untuk secepat-cepatnya memproduksi vaksin, termasuk Indonesia. Ketika sampai pada tahapan produksi, nanti akan ada tahapannya lagi. Ini harus diatur dan masif secara besar-besaran. Kita berbicara 260 juta orang, memvaksinnya dalam waktu yang harus cepat dan tentu sesuai dengan ketentuan. Jadi ini adalah mobilisasi tim dan kita juga perlu kerja bersama-sama.



Optimisme Bangkit Lawan Pandemi

Ketika kita menghadapi masalah dengan pendekatan yang pesimistis, maka itulah awal kegagalan kita. Sebesar apapun masalahnya apabila cara berpikir kita tetap optimistis dan rasional, itulah awal dari menyelesaikan masalah. Langkah konkrit pemerintah untuk melawan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah memilih keduanya; kesehatan pulih dan ekonomi kita tetap harus bangkit lagi.

Indonesia mempunyai tekanan di kuartal ke II, di mana ada kontraksi 5,32%, tetapi kontraksi kita ini termasuk kontraksi yang rendah jika dibandingkan kontraksi banyak negara besar lainnya yang begitu berpengalaman karena kontraksinya jauh lebih dalam. Ini menunjukkan ada kekuatan di dalam negeri. Negara-negara besar itu mungkin dianggap lebih sukses, tapi realitanya pada saat diproyeksikan terhadap ekonomi menurut ukuran makro GDP, ternyata kontraksinya jauh lebih dalam. Ini kan soal pilihan diksi saja. Apa yang

dimaksudkan adalah memberikan gambaran bahwa ada kekuatan di kita yang harus kita eksplor lebih dalam. Itulah optimismenya.

Kekuatan harus kita gunakan dan kita temukan. Lantas kekuatan itu ada di mana? Tentu pada gotong royong itu sendiri. Dari sisi ekonomi kekuatannya ada di UMKM dan ultra mikro karena merupakan penyumbang GDP 60% dan dia kuat. Untuk itu, optimism tersebut wajib didukung dengan kebijakan keberpihakan. Siapa yang paling terdampak? Nah keberpihakan ada pada yang paling terdampak.

Saat ini dari sisi stimulus dan kebijakan APBN, keberpihakan kepada yang kecil seperti ultra mikro, mikro, tenaga kerja dan didorong supaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui padat karya. Hal itu merupakan kebijakannya langsung dan dari situlah optimisme kita untuk *reborn*. Kita mulai *reborn* dengan menurunkan kontraksi di kuartal ke-III, kuartal IV dan selanjutnya kita *take off*. Oleh karena itu, harus ada optimisme di sana.

Orkestrasi Indonesia Maju,

Bawa Optimisme Melawan COVID-19 & Percepat Transformasi Digital

Bangkit untuk Indonesia Maju menjadi narasi yang diangkat pemerintah sejak Pidato Kenegaraan 14 Agustus, Peringatan Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, melalui orkestrasi Indonesia Maju ini kita mengedepankan semangat optimisme.

“Presiden mengajak masyarakat untuk melihat masa depan secara optimis, jangan sampai membawa narasi pesimisme masyarakat. Orkestrasi Indonesia Maju dengan semangat optimisme yang harus kita bangun,” ujarnya dalam Rapat virtual Pengarahan Komunikasi dan Sosialisasi Agenda Narasi Tahunan Pemerintah Tahun 2020 dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (07/08/2020).

“**Pandemi COVID-19 menguatkan semangat gotong-royong masyarakat untuk saling membantu, saling mendukung, dan tidak mengucilkan**

Momentum Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia ditengah Pandemi COVID-19 ini, diungkapkan Menteri Johnny berlangsung sebagai orkestrasi dalam komunikasi publik dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat. “Ini yang harus kita lakukan secara strategis di dalam suatu orkestrasi yang berkesinambungan. Perayaan 17 Agustus dalam rangka awal menuju Indonesia Maju 2045 ini menjadi gerakan masyarakat dengan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan,” ungkapnya.

Menkominfo juga menambahkan bahwa ditengah Pandemi COVID-19, target dan kerja keras harus dilakukan melalui *recovery* dan reformasi. Manifestasi Indonesia menjadi negara maju sebagai sebuah peradaban baru ini perlu diperkuat dengan modal bangsa yang resilien dalam beradaptasi dengan didasari semangat gotong royong dan persatuan bangsa.

“Pandemi COVID-19 menguatkan semangat gotong-royong masyarakat untuk saling membantu, saling mendukung, dan tidak mengucilkan. Perilaku gotong royong tidak untuk disombongkan, melainkan saling menguatkan harapan ditengah kesulitan,” ujarnya.

Percepat Transformasi Digital

Selama pandemi COVID-19, Menteri Kominfo mengungkapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menunjukkan kemampuan adaptasi yang tangguh, cepat dengan langkah-langkah kreatif menuju hidup produktif dan aman di tengah situasi sulit. Momentum ini tidak boleh dilewatkan justru harus dimanfaatkan.

Tahun 2021 akan menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

Selain itu, Menteri Johnny juga menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan akselerasi transformasi digital di saat pandemi COVID-19. Menurutnya, selama pandemi, Indonesia mampu beradaptasi dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk akselerasi pembangunan dan *recovery*, "Tahun 2021 menjadi tahun transformasi digital," jelasnya.

Percepatan transformasi digital yang dilakukan pemerintah melalui

“ Fokus Pengembangan TIK: Akselerasi transformasi digital, Pelayanan publik yang efisien dan cepat, Konsolidasi dan optimasi infrastruktur, dan Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas. ”

Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan lima prioritas. Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 Desa/Kelurahan dan 150.000 titik layanan publik (termasuk layanan kesehatan) yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.

Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia; serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efisiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.

Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level "literasi digital", "talenta digital", sampai level "kepemimpinan era digital".

Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan startup digital.

Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, terutama Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi/penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021, anggaran pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencapai Rp 30,5 triliun. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada beberapa

sektor guna mendukung dan meningkatkan kualitas serta delivery layanan ke masyarakat, difokuskan pada beberapa hal antara lain: (1) mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (2) mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; (3) mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta (4) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa/kelurahan 3T.

Sedangkan untuk program strategis dari pengembangan TIK ini mencakup antara lain Penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) sebanyak 5.053 lokasi; Penyediaan kapasitas satelit di 12.377 lokasi layanan publik; Pembangunan Pusat Data Nasional Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur; Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Pemutakhiran DTKS, perangkat IT dan Jaringan Komunikasi; dan Mendukung digitalisasi pendidikan seperti pengadaan alat TIK dan media pembelajaran.



Visi Indonesia 2045 Melengkapi Satu Abad Indonesia

Indonesia akan menuju usia emasnya pada tahun 2045. Saat mencapai usia 100 tahun tersebut, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Seiring dengan pertumbuhan usia bangsa, banyak tantangan yang akan muncul dan dihadapi. Oleh karenanya, diperlukan adaptasi dan transformasi di semua aspek untuk menyiapkan masyarakat menyambut Indonesia Emas 2045.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa negara-negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. "Infrastruktur dan SDM yang berkualitas merupakan dua tahapan awal bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju. Dua tahap itu yang kini sedang diupayakan oleh pemerintah," jelasnya dalam diskusi Forum A1 yang digelar di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat tahun lalu.

Pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah menjadi program prioritas pemerintah. Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi awal

terus dilanjutkan dengan prioritas yaitu mulai menghubungkan infrastruktur dengan sektor lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, setelah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia selesai maka kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu inovasi dan teknologi. "Setelah mampu menyelesaikan dua tahap pembangunan tersebut, tahapan ketiga yang harus dihadapi bangsa ini adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi." ungkap Presiden Jokowi.

Melalui Visi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk ke dalam 4 (empat) besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Berdasarkan MER (Market Exchange Rate), ranking PDB Indonesia diperkirakan meningkat dari urutan ke-16 pada tahun 2015/2016 menjadi urutan ke-9 pada 2030 dan urutan ke-4 pada tahun 2045.

Peran Milenial pada Indonesia 2045

Dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi, kita akan menikmati percepatan pertumbuhan

ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Bonus demografi ini harus disikapi dengan baik dan bisa menjadi kesempatan emas untuk mewujudkan mimpi bangsa kita menjadi negara maju dan dapat bersaing dengan negara lainnya.

Dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif

Untuk memanfaatkan bonus demografi, maka generasi milenial harus dibentuk kualitasnya mulai dari sekarang. Pada tahun 2025 hingga tahun 2050 mendatang, generasi milenial yang ada saat ini akan memasuki puncak usia produktifnya. Oleh karena itu, generasi muda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing meraih kesempatan kerja dan bersaing dengan negara-negara lain. Ini berarti mulai dari sekarang, mereka harus meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual secara optimal.

Generasi milenial ini harus disiapkan dan dilatih dalam merespon isu-isu strategis yang hadir saat ini dan di masa mendatang, karena peluang dan tantangan akan semakin kompleks. Sehingga keberhasilan dari Indonesia Emas 2045 ini akan bergantung pada generasi milenial hari ini. Pemerintah dan juga seluruh pihak perlu untuk mempersiapkan generasi milenial ini dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Hal ini dikarenakan peluang dan juga tantangan ke depan semakin banyak dan kompleks sehingga kita perlu mempersiapkan mereka untuk merespon isu-isu strategis yang muncul.

Pilar Visi Indonesia 2045

Masih ada waktu 25 tahun lagi untuk mempersiapkan Visi Indonesia 2045 yang didukung empat pilar utama, Pilar pertama, pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Mengutip dari laman Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2016 – 2019, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pengeluaran untuk Research and Development (R&D) diharapkan dapat meningkat dari 0,1 persen PDB di 2013 menjadi 1.5 persen PDB di 2045. "Pembangunan manusia lewat Iptek nantinya harus berujung pada R&D yang kuat. Inovasi hanya bisa lahir kalau ada R&D yang kuat, ini yang terus terang membuat kita banyak ketinggalan dari negara lain," ujarnya.

Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

Ketiga, pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. pemerataan adalah perspektif yang diorientasikan untuk mengatasi segala bentuk kesenjangan. Karenanya, pembangunan harus mengembangkan mekanisme dan strategi yang menjamin pemerataan antarwilayah, antardaerah, antarsektor, antarkota dan desa, maupun antarpusat dan daerah. Aktivitas ekonomi dan sumber daya pembangunan harus disebar merata di wilayah Jawa dan luar Jawa, di kawasan timur dan barat Indonesia, di daerah yang kaya maupun miskin sumber daya, di sektor produktif maupun tidak.

Keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

Tujuan dari empat pilar ini antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Empat pilar ini akan menjadi modal yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju, sehingga Visi Indonesia 2045 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dapat tercapai.



Semarak Kemerdekaan,

Sebarkan Pesan Positif

Pandemi COVID-19 seolah “memaksa” tahun 2020 menjadi tahun virtual bagi kegiatan sehari-hari kita. Sekolah virtual bagi anak-anak, sidang dan wisuda virtual bagi para mahasiswa, silaturahmi virtual di Hari Raya Idulfitri tanpa tradisi mudik yang sudah menahun khas lebaran, hingga perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-75 yang juga dilakukan secara virtual.

Jika tahun-tahun sebelumnya masyarakat hadir berbondong-bondong mengikuti upacara secara langsung di Istana Negara, dan bersuka cita menyambut perayaan kemerdekaan dengan lomba-lomba tradisional khas nusantara, kini tidak lagi. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi membuat perayaan “Tujuh Belasan” harus berganti cara.

Berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti selaku Ketua Bidang Publikasi dalam HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini, tim KominfoNext mendapat gambaran bagaimana negara melalui para kementerian/lembaga turun tangan memastikan kemeriahan HUT RI tetap terasa meski dengan suasana yang berbeda.

“Kemeriahan HUT Kemerdekaan tetap berjalan tapi berbeda. Tidak ada kerumunan, kerumunannya melalui online. Kalau tahun-tahun sebelumnya Istana mengundang

masyarakat untuk hadir upacara di Istana, kalau tahun sekarang yang hadir (di Istana) hanya sekitar 20 orang,” jelas Sekjen Niken.

Sebagai bidang publikasi, tentunya, Kementerian Kominfo bertanggung jawab memastikan agar pesan kunci “Indonesia Maju” dalam perayaan HUT RI ke-75 ini sampai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Kita menetapkan *key message* dulu, pesan-pesan kunci. ‘Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, gotong royong, nasionalisme, dan bangkit untuk Indonesia Maju.’ Jadi secara ringkas pesannya seperti itu, optimisme di tengah pandemi,” tuturnya.





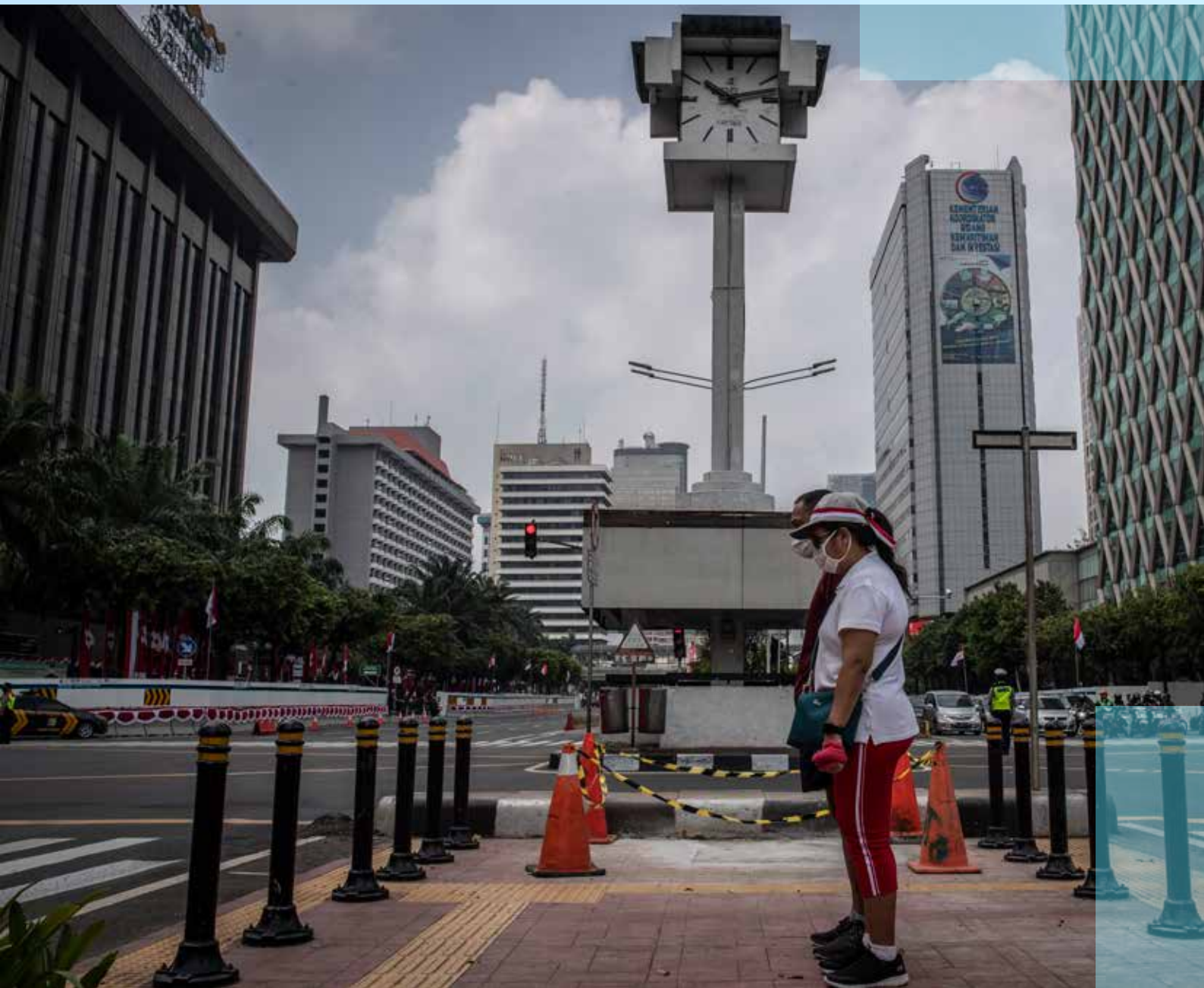
Langkah kedua yang dilakukan adalah menetapkan targeting bagi khalayak sesuai dengan strategi komunikasinya masing-masing. "Misalnya usia tua-muda, demografi di desa, kota, kelompok yang lifestyle-nya berbeda, agamis, modern, harus dengan strategi komunikasi yang berbeda. Itulah kenapa kita membuat kategori bagi *target audience* kita, semua bisa dijangkau tapi dengan caranya masing-masing."

Berbagai platform dan bentuk komunikasi pun digunakan untuk mendiseminasikan pesan kemerdekaan tahun ini. "Kita gunakan *channelling*, *multi-platform*, multi-kanal. (Tidak hanya, red.) kanal media *mainstream* seperti radio, TV, media cetak, media daring, tapi juga media sosial. Juga tatap muka secara virtual. Seperti sosialisasi ke Dinas-Dinas Kominfo, Humas-Humas, Dialog Interaktif di berbagai TV. Jadi semua kita jangkau," papar Sekjen Niken.

Semarak Kemerdekaan dengan Lomba

Kesemarakan HUT RI ke-75 turut diisi dengan event-event kreatif seperti Lomba Rayakan Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh panitia nasional, berupa lomba video "Cinta Indonesia" dan lomba podcast "Cerita Kemerdekaan".





“Ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh panitia nasional, yaitu lomba video yang dikoordinasikan oleh Kemenparekraf. Isinya kegiatan-kegiatan seputar 17 Agustus. Karena mereka mengambil judulnya pas 17 Agustus, jadi materinya memang materi 17 Agustus. Dalam satu video isinya tentang nasionalisme, gotong royong misalnya membuat

gapura, penghormatan bendera saat upacara. Masih penjurian, tanggal 1-6 September dinilai oleh warganet, tanggal 7 diumumkan pemenangnya. Hadaahnya keseluruhan Rp 1 miliar,” jelas Sekjen Niken.

Sementara untuk lomba *podcast* dikoordinasi langsung oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik. “Lomba cerita kemerdekaan. Bagaimana anak-anak muda mengisi kemerdekaan sekarang. Jadi seperti apa optimisme, bangkit dari pandemi saat ini. Bagaimana generasi muda itu melihat peluang-peluang di tengah tantangan. Pengumuman tanggal 6 September, saat ini masih dalam proses penjurian,” paparnya.



Sikap Sempurna Tiga Menit

Yang paling terasa berbeda dalam HUT Kemerdekaan RI tahun ini tentunya saat puncak Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Kemerdekaan RI yang “terpaksa” harus dilakukan secara virtual. Jika biasanya upacara dihadiri langsung oleh ratusan peserta, kini hanya sekitar 20 peserta termasuk pengibar bendera.

Sebagai gantinya, Istana mengundang masyarakat untuk mengikuti upacara bendera secara virtual. Sekretariat Presiden mengalokasikan 17.845 undangan bagi masyarakat. Pihak Sekretariat Presiden membuka kurang lebih 15 ruang virtual bagi belasan ribu pendaftar tersebut, di mana masing-masing ruang dipandu oleh pembawa acara profesional yang menyemarakkan suasana. “Yang lainnya mengikuti secara live streaming, TV, radio,” jelas Sekjen Niken.

Sementara di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, upacara bendera menyesuaikan. “Di masing-masing provinsi kota/kabupaten, sebelum pukul 10 sudah melakukan upacara bendera dengan menyesuaikan. Lalu pukul 10.00 WIB mengikuti pengibaran bendera (melalui ruang virtual) di Istana.”

Ada hal lain yang menarik di perayaan kemerdekaan tahun ini. Tepat pukul 10.17 WIB pada tanggal 17 Agustus, masyarakat diminta

menghentikan kegiatannya sejenak, mengambil sikap sempurna dan berdiri tegak untuk ikut menghormati Peringati Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

“Pukul 10.17 menit semua masyarakat dihimbau untuk hormat bendera, dengan sikap tegak untuk hormat bendera. Sekalipun di pasar, di tempat-tempat umum, di rumah, di manapun kecuali di jalan ya tentu tidak bisa, kita hormat bendera selama 3 menit,” jelas Sekjen Niken.

Tata cara upacara daring dan penghormatan ini terus disosialisasikan Kementerian Kominfo melalui berbagai platform media, termasuk menggerakkan seluruh media yang dimiliki kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah.



Indonesia Maju, Optimisme di Tengah Pandemi

Tanggal 17 Agustus 2020 ini, Bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 yang akan diperingati dalam suasana berbeda. Perayaan tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Jika biasanya pada Bulan Agustus kampung-kampung sudah semarak dengan berbagai pernak-pernik dan perlombaan 17-an, tahun ini terasa sepi dan biasa saja. Namun tentunya, berkurangnya kemeriahan Perayaan Hari Kemerdekaan di tahun ini tidak mengurangi kekhusyukan masyarakat dalam meresapi semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, melakukan konsolidasi baik ke kementerian/lembaga sampai dengan Pemerintah Daerah dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan ke-75. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kominfo merujuk pada realitas baru diluar realitas sosial, yaitu realitas virtual.. Realitas sosial merujuk pada sesuatu yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial sedangkan realitas virtual yang terjadi di dunia maya/virtual/digital. Perubahan tata cara pelaksanaan upacara bendera misalnya, menjadi realitas baru baik pada aspek sosial dan virtual dengan adanya upacara secara virtual. "Proses upacara di istana menggunakan virtual, termasuk juga dengan mengundang masyarakat luas untuk mengikuti upacara secara virtual," ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prof. Widodo Muktiyo dalam Talkshow Newscast di Studio CNN Indonesia, Senin (10/8).



Tahun ini, tema besar Peringatan Kemerdekaan ke-75 yaitu Indonesia Maju yang merepresentasikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk memupuk kembali optimisme dengan semangat Indonesia Maju. Semangat optimisme ini tercermin dalam langkah-langkah penanganan COVID-19 oleh pemerintah dimana Presiden Jokowi bertindak langsung sebagai lokomotifnya, melalui Perpres 82/2020 Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga penanganan pandemi ini dilaksanakan dengan memastikan keseimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Hadirnya komite ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan penanganan COVID-19 di masyarakat secara lebih baik lagi, ditambah dengan hadirnya Inpres 6 Tahun 2020 yang akan semakin meningkatkan konsolidasi pemerintah dari level pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota untuk betul-betul bertanggungjawab dalam mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol-protokol penanganan COVID-19.

Kasus pelanggaran protokol penanganan COVID-19 yang paling sering terjadi di masyarakat yaitu terkait penggunaan masker. Secara kognitif masyarakat sudah aware untuk menggunakan masker, namun bagaimana memakai secara terus-menerus masih harus lebih digaungkan di masyarakat. "Itulah dinamika mendidik masyarakat untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini dengan cara komunikasi dari waktu ke waktu," lanjut Dirjen Widodo. Masyarakat diuji konsistensinya untuk bisa menjalankan roda perekonomian dengan tanpa melupakan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.



Dalam melakukan komunikasi ke masyarakat untuk penanganan COVID-19, Kementerian Kominfo menggandeng salah satunya dengan Siberkreasi. Diharapkan, dengan menggandeng Siberkreasi bisa menjangkau kaum millennial secara lebih optimal. "Saat ini Kominfo juga berkolaborasi dengan Siberkreasi melalui literasi yang tidak menggurui tetapi memberikan inspirasi dan kesadaran baru," ungkap Dirjen Widodo. Sedangkan untuk masyarakat di desa-desa, Kementerian Kominfo mengandeng tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain itu juga, Kementerian Kominfo juga melakukan pendekatan kearifan lokal seperti misalnya menggunakan bahasa daerah setempat.

Program Penanganan Konten Hoaks

Era digital telah memberikan perubahan pola konsumsi dan distribusi masyarakat, tidak hanya Indonesia tetapi juga secara global. Saat ini, semua orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi dengan hadirnya sosial media. Arus hoaks menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penanganan konten di jagat digital. Kementerian Kominfo memiliki *cyber drone* yang bekerja 24 jam untuk memonitor konten di *website* dan media sosial. Namun, hoaks tidak hanya terbatas di kanal itu saja, aplikasi instant messaging yang memiliki platform tertutup sangat rawan dengan peredaran hoaks didalamnya. Proses monitoringnya tidak bisa dilakukan secara langsung dan membutuhkan aduan dari masyarakat ataupun proses upload ke media sosial/*website* untuk bisa ditindaklanjuti.

Hoaks dikala pandemi sama berbahayanya dengan pandemi itu sendiri. Dari hasil pemantauan Kementerian Kominfo, hoaks ditengah pandemi terjadi pada tanggal 22 – 29 Maret yang menimbulkan terjadinya *panic buying* di masyarakat. Dalam hal ini, hoaks bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk merespon terhadap suatu isu. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo bertindak tegas, jika ditemukan konten hoaks, akan langsung di take down. Pada beberapa kesempatan, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyampaikan bahwa akan menindak secara serius penyebar hoaks dengan pidana penjara





paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di tengah membludaknya informasi di dunia maya, Dirjen Widodo mengingatkan agar jangan sampai terjebak pada tsunami informasi dan pandemi yang saat ini dikenal dengan istilah infodemik. Infodemik merujuk pada informasi berlebih akan sebuah masalah sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk menghadapi hal ini, Kementerian Kominfo membuat narasi terintegrasi yang disajikan melalui multiplatform baik di media arus utama, media sosial maupun ke masyarakat berbasis komunitas. Tentunya, media arus utama akan menjadi leadnya dikarenakan dari sisi *trust* paling tinggi, kemudian media konvensional hingga ke media sosial. Tantangan dalam mendiseminasikan informasi tersebut yaitu *trust*, oleh karenanya konsistensi dalam membangun pesan dan membangun narasi diharapkan bisa membangun kepercayaan masyarakat.

S, M

Langkah Kominfo di Tengah Pandemi

Dalam upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo mendorong adanya akselerasi transformasi digital. Hal ini menjadi penting di tengah tuntutan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan produktif namun tetap aman dari penularan COVID-19. Dirjen Widodo menggarisbawahi akan pentingnya komunikasi dan edukasi ke masyarakat di tengah proses transformasi ini. Namun, yang tidak kalah penting yaitu bagaimana implementasinya di lapangan setelah edukasi dilaksanakan. "Jangan sampai kita edukasi saja masyarakat, namun terkadang ada juga yang harus didampingi dan ditegakkan aturannya, termasuk juga engineeringnya serta bagaimana protokol-protokol itu kita jadikan pegangan," ungkapnya.

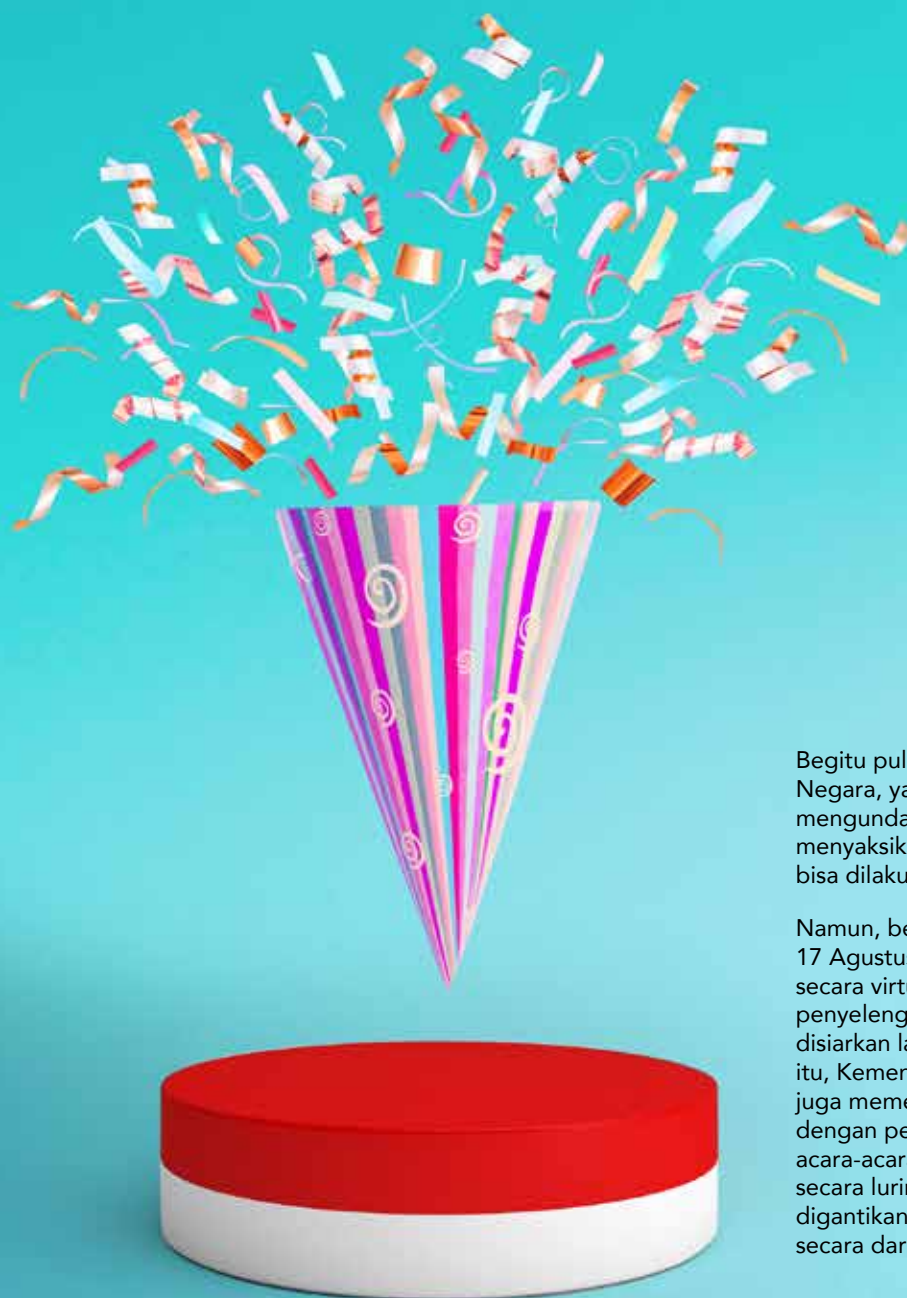
Dirjen Widodo mengamati bahwa selama 6 bulan masyarakat bergulat dengan pandemi, terjadi perubahan perilaku masyarakat dengan adanya gaya hidup sehat, solidaritas serta konektivitas. Pada momen 17 Agustus tahun ini, Presiden Jokowi merencanakan mimpi satu abad Indonesia ditahun 2045 untuk menjadi 5 besar negara dengan peradaban maju di dunia. Mimpi tersebut kita akan bangun menjadi harapan dan budaya yang harus dikembangkan secara terus menerus. Lebih lanjut, Dirjen Widodo mengajak masyarakat untuk mendisiplinkan diri, gotong royong, optimis dan *stay positive*. "Pada momen 17 Agustus ini, mari kita bangkit untuk Indonesia Maju, salah satunya dengan bangkit melawan COVID-19," pungkasnya.



Selebrasi Virtual

Bulan Kemerdekaan

Republik Indonesia



Bulan Agustus 2020 ini, Indonesia tepat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Tema besar "Indonesia Maju" yang diangkat diharapkan dapat menjadi salah satu simbolisasi Bangsa Indonesia yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia.

Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan beragam kemeriahan seperti perlombaan panjat pinang, tarik tambang, lomba kelereng, dan beragam perlombaan rakyat lainnya yang selalu ditunggu-tunggu, sebagai bentuk suka cita masyarakat merayakan Kemerdekaan Indonesia.

Begitu pula upacara 17 Agustus di Istana Negara, yang setiap tahunnya selalu mengundang ratusan masyarakat untuk hadir menyaksikan upacara secara langsung, kini tak bisa dilakukan.

Namun, berkat adanya teknologi, perayaan 17 Agustus 2020 kemarin diselenggarakan secara virtual dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan Upacara Bendera Virtual yang disiarkan langsung dari Istana Negara. Tak hanya itu, Kementerian dan Lembaga Pemerintahan juga memeriahkan bulan Kemerdekaan ini dengan perlombaan virtual hingga rangkaian acara-acara yang biasanya diselenggarakan secara luring (luar jaringan) atau tatap muka digantikan dengan menggunakan internet atau secara daring. Apa saja kegiatannya?

Kompetisi Video "Cinta Indonesia"

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia yang digelar secara terbatas di tengah pandemi diharapkan tidak mengurangi makna peringatan tersebut. Kreativitas dan suguhan yang dalam tiap acara peringatan biasa disalurkan tidak akan berkurang sedikitpun.

Untuk memeriahkan 17 Agustus pada tahun ini, Kemenparekraf/Baparekraf bersama 6 Kementerian lain menggelar lomba video dengan total hadiah Rp 1 Miliar bertema 'Cinta Indonesia'.

Dalam lomba ini, warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang sedang merantau di luar negeri, diajak untuk menuangkan kreativitasnya dengan membuat video berdurasi 3 menit yang mencerminkan 'Kerja Bersama Kita Bangkit', dengan upaya mempercantik lingkungan dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Lomba video ini juga wajib menunjukkan rasa cinta Indonesia dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dengan berdiri tegap sikap sempurna saat dikumandangkan pada 17 Agustus pukul 10.17 WIB.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani dalam Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

"Kreativitas tidak terhalangi oleh kondisi ini, cuma akan dilakukan dengan cara yang lain, teknologi. Kami yakin bahwa tidak akan mengurangi makna dan tetap ada rasa kemeriahan bagaimana kita memperingati HUT RI ini. Nanti kita lihat hari H-nya, kreativitas itu selalu ada, masih disimpan supaya jadi surprise," ujarnya.

"Dengan kondisi yang sekarang bukan berarti kita juga berduyun-duyun melakukan lombanya secara offline, tetapi dengan melalui rekaman video. Jadi yang mengikuti

lomba, silakan membuat video 3 menit dan bisa mengunduh panduannya di [website hutri75.kemenparekraf.go.id](http://website.hutri75.kemenparekraf.go.id)," tuturnya.

Protokol kesehatan tetap menjadi persyaratan pada saat melakukan kebersihan lingkungan dan juga pada saat upacara dalam kampanye yang diusung Kementerian Parekraf. Pendaftaran untuk lomba yang berhadiah total Rp1 miliar tersebut sudah dimulai tanggal 1 Agustus lalu hingga 20 Agustus mendatang. Para peserta diminta untuk mengunggah video yang dibuatnya ke tiga media sosial yang dimiliki peserta baik itu YouTube, Facebook, maupun Instagram dengan menuliskan tagar #BangkitUntukIndonesiaMaju. Tautan dari unggahan di media sosial tersebut dikirimkan ke laman pendaftaran. Dari hasil penjurian tersebut nantinya akan dipilih 6 pemenang dari 25 finalis.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menjelaskan, rangkaian peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI akan tetap dilaksanakan mulai dari pidato kenegaraan, pelantikan anggota Paskibra nasional, hingga

penaikan dan penurunan bendera Merah Putih dari Istana Merdeka.

Semuanya dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan akan disiarkan secara daring agar dapat disaksikan seluruh masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri, termasuk momen mengheningkan cipta pada pukul 10.17 WIB.

"Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk membunyikan sirene sebagai tanda memasuki waktu tersebut. Sehingga masyarakat diharapkan bersamasama dapat mengikuti momen tersebut," kata Heru Budi.

Untuk diketahui, selain lomba rayakan kemerdekaan tersebut, panitia juga akan menggelar lomba lainnya untuk menebak busana adat apa yang nantinya akan dikenakan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara dalam upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020 mendatang di laman yang sama. Kemenparekraf/Baparekraf juga sudah menyiapkan hadiah total sebesar Rp 1 miliar serta satu Piala Presiden.



Ketentuan Lomba

- ✓ Lokasi lomba berada di wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri
- ✓ Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili baik di Republik Indonesia atau di luar Negeri
- ✓ Tema Perlombaan "**Cinta Indonesia**"
- ✓ Durasi Video 3 Menit dalam format MPEG4
- ✓ Karya Harus Menyertakan Logo HUT ke-75 Kemerdekaan RI yang dapat diunduh di situs www.setneg.go.id
- ✓ Karya harus memiliki unsur "**Cinta Indonesia**" terdiri atas **Bendera Merah Putih, Berdiri Tegap Sikap Sempurna saat Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan Serentak Pukul 10.17 WIB**
- ✓ Proses **harus** tetap **Memperhatikan Protokol Kesehatan**
- ✓ Proses **harus** tetap **Memperhatikan Ketentuan pada UU Nomor 24 Tahun 2009** Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
- ✓ Video milik peserta dan orisinil, jika terjadi pelanggaran hak cipta menjadi tanggung jawab peserta
- ✓ Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

Sumber: Diolah dari CNN Indonesia dan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kementerian BUMN Gelar 17an Virtual

Ada yang berbeda dari perayaan 17 Agustus 2020 dari Kementerian BUMN. Perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN telah hadir di platform Instagram melalui akun @17anvirtual dengan tajuk "ramaikan terus bulan kemerdekaan bangsa kita dan terus tunjukkan semangat Indonesia Maju!".

Lomba pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN adalah Lomba Desain Masker yang bekerja sama dengan Masker Untuk Indonesia dengan total hadiah 50 juta Rupiah. Penilaian dalam perlombaan ini akan dilihat dari sisi kreativitas, originalitas, dan kualitas dari desain yang sesuai dengan tema Indonesia Maju. Periode waktu perlombaan secara virtual yang diselenggarakan yaitu sejak tanggal 7 Agustus hingga 17 Agustus 2020.

Pemenang dari Lomba Desain Masker ini akan mendapatkan Rp 10.000.000. Angka yang cukup menarik bagi para warganet yang memiliki keahlian di bidang desainer grafis. Akhirnya

setelah berjalan selama 6 hari yaitu sejak tanggal 7-12 Agustus 2020, submisi desain masker sudah berakhir dan ditemukan beberapa karya terbaik hasil pilihan dewan juri.

Desain masker para pemenang ini nantinya akan diproduksi dan disalurkan kepada organisasi/institusi yang membutuhkan dan tidak akan diperjualbelikan.



Selain itu, ada juga Lomba 17-an di platform Instagram yang berkolaborasi bersama ANTI GRVITY dengan total hadiah 10 juta Rupiah. Tata cara Lomba 17-an adalah peserta dapat menggunakan salah satu filter bertema Lomba 17an yang tersedia pada highlight di akun @17anvirtual atau melalui tautan linktr.ee/17anvirtual. Terdapat tiga filter yang bisa dipakai untuk berkreasi secara bebas yaitu:

- Filter Lomba Panjang Pinang
- Filter Lomba Makan Kerupuk, dan
- Filter Lomba Kelereng.

Dengan menggunakan salah satu dari ketiga filter tersebut, peserta harus berkreasi dalam membuat foto atau video kreatif dengan durasi maksimal 1 menit).

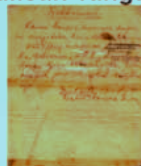
Hasilnya, sudah diumumkan 10 nama pemenang Lomba 17an Virtual dari Kementerian BUMN dan masing-masing pemenang mendapatkan 1 juta rupiah. Meskipun kegiatan lomba melalui akun @17anvirtual sudah selesai, warganet masih bisa menggunakan filter yang tersedia di highlight Instagram @17anvirtual selama bulan Agustus 2020.



Tulisan Tangan Bung Karno "Hadir" di Istana Negara

Dikutip dari *press release* yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2020, arsip yang menjadi saksi sejarah dalam proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni naskah konsep teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan turut dihadirkan di Istana Negara pada 17 Agustus 2020. Sama halnya dengan Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang kerap dihadirkan pada rangkaian kegiatan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara.

1. Tulisan Tangan



2. Cetak Mesin Ketik



3. Pamflet

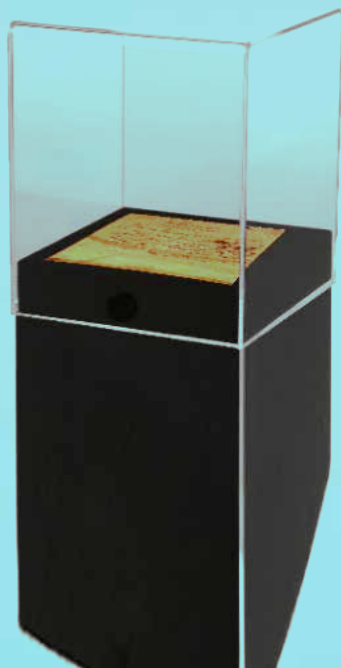


Pada 16 Agustus 2020, naskah konsep teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno dibawa dari Depot Penyimpanan Arsip Statis ANRI di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan ke Istana Negara oleh Tim dari Sekretariat Presiden (Setpres) Kementerian Sekretariat Negara RI. Direktur Preservasi ANRI, Kandar menyerahkan arsip bersejarah tersebut untuk sementara waktu kepada Kepala Biro Umum Setpres, Yudhi Wijayanto. Setelah selesai digunakan di Istana Negara, arsip bersejarah tersebut akan kembali disimpan di ANRI.

Sejak tahun 1992, ANRI telah menyimpan naskah konsep teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno di ruang penyimpanan khusus. Naskah konsep teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno tersebut setelah disalin dalam ketikan oleh Sayuti Melik tanggal 17 Agustus pagi tahun 1945 kemudian dibuang di tempat sampah. Teks tersebut kemudian diselamatkan dan disimpan oleh BM Diah.

Sebagaimana tercantum dalam Arsip Pernyataan Penyerahan Naskah Konsep Teks Proklamasi, pada tanggal 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan Naskah Konsep Teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara periode 1988-1998, Moerdiono.

Selanjutnya, Moerdiono menyerahkan Naskah Konsep Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno tersebut kepada Kepala ANRI periode 1992-1998, Noerhadi Magetsari, untuk dilestarikan di ANRI. Sejak saat itu hingga kini ANRI menyimpan Naskah Konsep Teks Proklamasi tulisan tangan Bung Karno.



Kisah Lensa

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat umat manusia perlahan beradaptasi memasuki tatanan kehidupan baru. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan fisik dan berkumpul dengan banyak orang di satu tempat, sangat berkurang intensitasnya. Jikapun terpaksa, jumlah orang dan protokol kesehatan yang dijalankan akan sangat ketat. Tujuannya, tentu saja untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19.







Semangat kemerdekaan RI akan tetap melekat di relung hati bangsa Indonesia.

Tak terkecuali di Bulan Agustus ini, bulan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kemeriahan perlombaan rakyat di berbagai sudut gang-gang perkampungan yang biasanya dipadati warga, harus dilaksanakan dengan cara berbeda. Masker dan *hand sanitizer* menjadi salah satu protokol wajib yang tak boleh absen dalam gelaran lomba bawa kelereng dan lomba memasukkan pensil ke botol tahun ini. Dan tentunya, tetap menjaga jarak.





Seremonial kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI pun dilakukan dengan cara yang berbeda pula. Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR, hanya dihadiri secara fisik oleh tidak lebih dari setengah anggota MPR dan DPR, sebagian besar mengikuti secara virtual.

Begitu pula Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang menjadi momen puncak perayaan, yang setiap tahunnya dihadiri ratusan undangan dan disaksikan masyarakat secara langsung di istana negara, kini disaksikan secara virtual.



Semangat untuk bangkit

merdeka dari COVID-19,
mewujudkan Indonesia Maju



Beberapa upacara pengibaran bendera yang diinisiasi masyarakat juga dilaksanakan dengan protokol ketat. Salah satunya proses pengibaran bendera Merah Putih oleh ratusan aktivis lingkungan hidup dan organisasi kepemudaan di tengah Situ Ciledug, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (17/8/2020).

Perubahan cara dalam memperingati HUT RI di tahun ini tentunya memberikan rasa yang berbeda bagi masyarakat. Walaupun begitu, semangat kemerdekaan RI tentu akan tetap melekat di relung hati setiap warga Indonesia. Semangat untuk terus berjuang, bangkit, merdeka dari COVID-19 untuk mewujudkan Indonesia Maju.



FITRI | LUTHFI | IDRIS | ALWIN | ADITYA | ASTRI | HANDINI



Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi di mana usia produktif lebih tinggi dimana usia non-produktif.

Maka dari itu, sebagai wajah pemimpin masa depan Indonesia yaitu generasi muda yang diwakili oleh para pegawai pemerintahan di Indonesia ini akan memaknai dan menceritakan secara singkat, perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19.



17an

ala

Aparatur



Fitri MS, PNS Kementerian Keuangan

Tahun ini akhirnya saya bisa upacara 17 Agustusan lagi di Istana Negara, walaupun secara virtual. Istimewanya bisa virtual bersama seribu masyarakat dari segenap penjuru daerah di Indonesia. Doa saya pada Perayaan HUT ke-75 RI Tahun 2020 ini agar bangsa kita dapat segera pulih dari pandemi, pulih kesehatan rakyatnya dan pulih ekonominya, serta tercapai cita-citanya menjadi negara Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia! #BangkitUntukIndonesiaMaju



Alwin Adityo, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Kalau tahun sebelumnya, menjelang HUT RI, di beberapa satker di OJK pasti ada lomba 17an kecil-kecilan seperti lomba makan kerupuk, dll. Tetapi karena pandemi tahun ini, lomba-lomba tersebut ditiadakan. Kegiatan 17an hanya terbatas pada upacara virtual saja. Upacara virtualnya juga sama seperti upacara biasa, *rundownnya* lengkap dan peserta diwajibkan menggunakan pakaian upacara. Semua peserta tertib selama berlangsungnya upacara sehingga tidak mengurangi rasa nasionalisme meskipun dilaksanakan secara virtual.



Ahmad Luthfi, PNS Kementerian ESDM

Momen Perayaan Kemerdekaan adalah momen silaturahmi tahunan. Momen di mana seluruh pegawai berinteraksi sangat cair tanpa melihat strata kantor dalam perlombaan2 maupun acara2 tambahan. Kapan lagi bisa nge-smash Direktur/ Dirjen kalau bukan di pertandingan tenis, *tackle* SesDitjen di pertandingan futsal, atau tarik mereka di perlombaan tarik tambang.

Tapi semua itu sirna ketika pandemi datang. Lomba tidak bisa dilakukan, upacara pun cuma bisa lewat Youtube.



M. Idris Zakaria,

PNS Badan Siber dan Sandi Negara

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun ini agak berbeda seperti perayaan tahun-tahun sebelumnya. Instansi saya, BSSN, hanya mengadakan upacara secara virtual dari rumah masing-masing. Sangat sederhana memang bila dibandingkan dengan perayaan sebelumnya, namun apa daya karena pandemi masih melanda negeri. Meski sederhana, kegiatan ini cukup seru dan benar-benar menyadarkan kami sebagai pegawai untuk terus bersemangat memberikan jaminan terhadap keamanan siber yang sangat dibutuhkan beberapa waktu belakangan ini. Bagi kami, upacara secara virtual memang sederhana namun rasa nasionalisme tetap dapat tumbuh di dalam diri. Saya berharap semoga pada peringatan selanjutnya kegiatan lain masih bisa dilaksanakan, baik seremoni atau virtual yang jelas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman.



Tiara Kharisma,

PNS Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI kali ini memang berbeda, tak lain karena kini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kendati demikian, tetap tidak mengurangi makna semangat kemerdekaan bagi pegawai di ANRI. Ada banyak kegiatan bahkan momemtum yang luar biasa yang justru lahir dalam momen kali ini. Contohnya saja, dalam sejarah baru kali pertama arsip naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno turut dihadirkan saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara. Sebagai entitas komunitas kearsipan, punya kebanggaan tersendiri akan hal ini. Selain itu, untuk kegiatan di lingkungan internal sendiri ada juga hal berkesan, yakni pelaksanaan kegiatan Seminar Peningkatan Jiwa Korsia yang mengusung tema Bring Out The New You. Ini seru, karena ANRI bekerja sama dengan tim ESQ untuk penyelenggaraan kegiatannya yang dilaksanakam secara daring dan luring dengan melibatkan seluruh pegawai ANRI. Semoga makna kemerdekaan pada masa pandemi ini juga menjadi hikmah untuk kita tetap teguh berjuang bersama bangkit dengan peran masing-masing menuju Indonesia Maju. Merdeka!



Aditya,

ASN Balai Monitoring Bali SDPPI Kominfo

HUT Kemerdekaan ke-75 RI di tengah pandemi adalah perjuangan versi baru yang bermodalkan kesatuan seluruh elemen untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi COVID-19. Secara individu, kita merayakan momen HUT Kemerdekaan ini di rumah dengan meluangkan waktu lebih bersama keluarga dan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Memberikan kasih dan bekal untuk membangun negeri.



Astri Augustine Prihartini,

PNS Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Tahun ini perayaan HUT RI di BKPM sangat berbeda karena pandemi. Di tahun-tahun sebelumnya, menjelang HUT RI, BKPM selalu mengadakan lomba 17an, namun tahun ini ditiadakan dan upacaranya dilakukan secara virtual. Tanggal 17 kami mengikuti upacara secara virtual dan saat Lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di seluruh Nusantara, kami seluruh pegawai BKPM berdiri tegap selama 3 menit. Bagi saya pribadi, rasanya sungguh haru dan menggugah rasa nasionalisme. Saya merindukan Indonesia yang bebas berkumpul, Indonesia yang merdeka dari segala rasa takut dan sakit. Semoga kita segera melewati pandemi ini. Dirgahayu Republik Indonesia! Investasi Tumbuh, Indonesia Maju.



Handini U Putri S

PNS Balai Monitoring Surabaya SDPPI Kominfo

Pada bulan Agustus ini, Balmon SFR Kls I Surabaya menggelar rangkaian kegiatan gebyar bulan Kemerdekaan Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia, mulai dari pertandingan olahraga, yel-yel, *fun games* sampai *knowledge sharing*. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tak lupa Balmon Surabaya mengedepankan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Selama lomba-lomba tersebut, ada beberapa selipan kampanye protokol kesehatan agar pegawai Balmon tetap disiplin.

Hasil kegiatan ini bisa dipantau melalui:

<https://m.facebook.com/balmon.surabaya>.

Harapan dari kegiatan ini adalah agar para pegawai Balmon Surabaya dapat memaknai dan mengikuti acara ini dengan penuh semangat sebagai wujud ucapan terima kasih kepada para pejuang bangsa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kami, anak cucunya. Kami merasa wajib untuk mengisi kehidupan merdeka ini dengan kegiatan bermanfaat yang dapat meningkatkan kerja sama, kekompakan, kebugaran dengan selalu menjunjung sportivitas. Hal inilah yang nantinya akan diaplikasikan dalam kinerja sehari-hari untuk menghadapi tantangan global. Jadi, tahun ini perayaan 17an tetap semarak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Foto Oleh Adha Tyas
Sumber: FB fanpage @balmon.surabaya

Selasa, 3 Agustus 2020, dilaksanakan Opening Ceremony sebagai Tanda Kick Off Rangkaian Kegiatan Gebyar Bulan Kemerdekaan Peringatan HUT RI Ke-75 di Balmon Surabaya. Rangkaian kegiatan Gebyar Bulan Kemerdekaan kali ini berlangsung dari tanggal 3 Agustus 2020 hingga acara puncaknya di tanggal 17 Agustus 2020.



Markas besar Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terlihat meriah dengan Sang Saka merah putih berteman umbul-umbul khas perayaan Kemerdekaan Indonesia.





Unik dan menarik nampaknya menjadi ciri khas Gebyar Bulan Kemerdekaan Peringatan HUT RI Ke-75 di Balmon Surabaya. Mengusung tema "New Normal", seluruh pegawai terbagi menjadi 4 tim, yaitu Tim Masker, Tim Cuci Tangan, Tim Social Distancing, dan Tim Bugar. Atribut yang digunakan masing-masing Tim pun meriah dan kreatif, dengan nuansa merah putih yang lekat dengan perayaan hari Kemerdekaan.





Gebyar Bulan Kemerdekaan ini diisi dengan kegiatan yang mengedepankan kerjasama tim, seperti lomba yell-yell, pertandingan olahraga (bulutangkis beregu, bola voli beregu, tenis meja beregu), fun game, juga permainan yang butuh ketrampilan berpikir seperti catur dan sharing knowledge.

#SiBerani

Hadir Untuk Lawan Bullying



Kasus perundungan (*bullying*) masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Kasus *bullying* ini tidak hanya hadir di dunia nyata tetapi juga di dunia siber, atau yang biasa disebut *cyberbullying*. Perlakuan *bullying* ini banyak yang membebani korbannya bahkan sampai ada yang menghabisi nyawanya sendiri karena tidak tahan dengan cemooh dari orang lain.

Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, sejak 2011 hingga 2019, ada 37.381 aduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari jumlah tersebut, pelaporan kasus *bullying* atau perundungan, di dunia pendidikan maupun media sosial mencapai 2.473 laporan. "Pemahaman literasi digital sangatlah penting untuk menekan angka perundungan siber dan mendorong generasi muda untuk nyaman berkreasi di dunia digital," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Niken Widiastuti yang dikutip dalam rilis aplikasi TikTok untuk kampanye #SiBerani.

Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, Kementerian Kominfo membuat gerakan sosial #SiBerani agar masyarakat dapat membebaskan diri dari energi negatif yang selama ini membelenggu sebagai hal yang biasa saja. Kampanye #SiBerani ini dibuat dengan fokus utama memberikan awareness bahwa *bullying* tidak bisa dibiarkan saja, harus segera diatasi dan dilawan.



Seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate yang mengatakan bahwa bullying hanya menyedot dan menghabiskan energi secara mubazir saja. Menteri Kominfo Johnny G Plate juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan energi positif bangsa untuk membangun solidaritas melawan pandemi COVID-19.

Kampanye #SiBerani didasarkan dari tema besar "kemerdekaan", yaitu kemerdekaan dalam arti kesempatan untuk bermimpi dan berkarya tanpa batas. Kementerian Kominfo ingin hadir sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi para korban perundungan untuk kembali bangkit melalui *self-empowerment*.

#SiBerani hadir dengan ungkapan yang mampu membangkitkan semangat para korban *bullying* dengan membebaskan diri dari energi negatif, memerdekakan pikiran dari belenggu orang lain, dan mewujudkan Indonesia Maju bersama netizen yang lebih bijak berkomentar di media sosial.

Saat ini, kampanye #SiBerani sudah ada di platform media sosial, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Diharapkan juga dalam kampanye ini, seluruh penyedia platform digital dapat membantu menyediakan dan menjaga lingkungan internet yang aman, sehingga dapat sejalan dengan harapan generasi muda dalam membangun Indonesia Maju.



KAMU BERBAKAT

**PERJUANGANMU
TAK AKAN
SIA-SIA**

**BIJAK
DI DUNIA
MAYA**

**BUAT KALIAN
YANG MENJADI KORBAN BULLYING
KALIAN ADALAH #SIBERANI**

Bebaskan diri kamu, sampaikan pesanmu,
dan dapatkan **Gift Box** dari Kementerian Kominfo!

Ditunggu sampai dengan
23 AGUSTUS 2020

@kemkominfo @kemenkominfo Kemkominfo TV

RANGGA BUKAN
INDONESIA

Untuk mendukung kampanye ini, audiens dapat menggunakan Instagram GIF #SiBerani dan mengunggahnya di Story Instagram. Media sosial Kementerian Kominfo pun juga mengunggah *kick-off* video edukasi seputar *cyberbullying* sebagai pengingat bahwa kasus perundungan bisa menyebabkan hal-hal negatif kepada para korban termasuk kematian.

Tim Biro Humas Kementerian Kominfo yang menjadi inisiator kampanye ini juga mengadakan beberapa *challenge* di media sosial untuk mendukung kampanye #SiBerani. Mulai dari TikTok Challenge dengan mengajak warganet untuk *recreate* video #SiBerani seperti tips menghadapi komentar negatif dari netizen, sampai audiens di platform Instagram, Twitter dan Facebook yang juga dapat mengikuti *challenge* untuk mengunggah foto/komentar/reply tentang cerita mereka menghadapi dan keluar dari belenggu perundungan yang pernah mereka alami selama ini.

Tim Biro Humas Kementerian Kominfo yang menjadi inisiator kampanye ini juga mengadakan beberapa *challenge* di media sosial untuk mendukung kampanye #SiBerani. Mulai dari TikTok Challenge dengan mengajak warganet untuk *recreate* video #SiBerani seperti tips menghadapi komentar negatif dari netizen, sampai audiens di platform Instagram, Twitter dan Facebook yang juga dapat mengikuti *challenge* untuk mengunggah foto/komentar/reply tentang cerita mereka menghadapi dan keluar dari belenggu perundungan yang pernah mereka alami selama ini.





Kick-off Video #SiBerani dapat disaksikan melalui Instagram @Kemenkominfo



MEMAKNAI TILIK

Winner Piala Maya 2018 - Film Pendek Terpilih
Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival 2018
Official Selection World Cinema Amsterdam 2019

TIM YU NING

Mangkane dha nduwe hape kuwi ora mung nggo nggaya thok, nanging kanggo golek informasi, ngono lho...

(Makanya pada punya hape itu nggak cuma dipake buat gaya-gayaan doang, tapi dipakai buat nyari informasi, gitu lho..)

Mulakno, Yu Ning, sregepa maca berita seka internet, dadine nek dijak omong ki nyambung ngono lho...

(Makanya, Yu Ning, rajin-rajinlah baca berita dari internet, jadi kalau diajak ngobrol nyambung, gitu lho.)

Informasi saka internet kuwi mitayani. Ana fotone, ana gambare.

(Informasi dari internet itu bisa dipercaya. Ada fotonya, ada gambarnya.)

Yu Ning, piye 'e? Jenenge internet kuwi gaweane wong pintar je. Ya ra bakal kleru ta ya...

(Yu Ning, gimana sih? Yang namanya internet itu kan buatan orang pandai. Ya nggak bakal salah lah...)

Dari kalimat-kalimat di atas, kita langsung bisa tahu dari mana kalimat-kalimat tersebut berasal. Ya, begitu fenomenalnya film pendek "Tilik" yang ditayangkan perdana pada 17 Agustus lalu tersebut, sehingga membuat kalimat-kalimat di atas menancap di benak pemirsanya. Apalagi sambil mengingat ekspresi Bu Tejo.

Sampai saat penulisan ini, hanya dalam 2 minggu penayangan, "Tilik" sudah disaksikan oleh lebih dari 20 juta penonton. Dan dari 20 juta penonton itu, tak tahu lagi jumlah pembicaraan dan meme yang dihasilkan.

Dan seperti biasa, para pemerannya, terutama Bu Tejo, langsung diganjar dengan eksposur bertubi-tubi dari media konvensional dan digital. Bahkan, tak ketinggalan, banyak brand yang "gercep" mendaulat pemeran Bu Tejo untuk membintangi iklan produk mereka. (*Cairrr ya Bu Tejo?*)

Bagi yang belum nonton (*kasihan amat*), film produksi tahun 2018 ini berkisah tentang serombongan ibu-ibu sebuah desa yang bermaksud "tilik" atau berkunjung ke rumah sakit tempat Bu Lurah harus dirawat, yang cukup jauh jaraknya. Ya, bezoek, istilah lainnya.

Sebagaimana lokasi cerita yang di-setting berada di "Mbantul", Yogyakarta, yang selalu istimewa, maka cara mereka "tilik" pun istimewa, naik truk bak terbuka. Fenomena "numpak" truk terbuka bak anak-anak punk yang memaksa numpang ini adalah kenyataan yang memang masih terjadi hingga saat ini, meskipun sudah makin jarang ditemui. Dalam hal keunikan fenomena "*ladies on top*" (yang juga menjadi judul film dalam bahasa Inggris) inilah, film menjadi sangat sinematografis.

Tetapi kita di Kominfo pasti akan lebih "*relate*" dengan jalan ceritanya. Dikisahkan

bahwa sepanjang perjalanan di atas truk terjadi ghibah dengan topik tunggal tentang sosok perempuan muda dan cantik di desa mereka yang bernama Dian. Bu Tejo merupakan antagonis utama yang membuka banyak "fakta" tentang Dian yang membawa petunjuk kepada perilaku tak terpuji sebagai seorang perempuan. Misalnya: sering keluar masuk hotel, sering kedatangan jalan di mal bersama seorang lelaki, memiliki barang-barang "branded" padahal belum lama kerja, dan profesi sebenarnya pun tak diketahui oleh mereka semua. Gelontoran informasi ini diamini oleh Bu Sam dan Bu Tri, dua antagonis lainnya. Ditambah pula, mereka membawa-bawa internet yang dipuja-puji sebagai bikinan orang pintar yang tentu tak pernah salah.

Sementara Yu Ning tampil sendirian menjadi protagonis yang membela Dian *vis a vis* rombongan pemasok "informasi" tersebut. Sendirian, sepanjang film, Yu Ning bertahan dan membantah, dengan amunisi seadanya, atas semburan informasi negatif tentang Dian dari ketiga ibu-ibu tersebut. Bahkan praktis Yu Ning melawan netizen yang "mahabener" karena komentar-komentar di media sosial tentang Dian dibawa serta juga.

Twist-nya adalah: di akhir cerita (awas spoiler!) ketahuan bahwa ternyata Bu Tejo dan kawan-kawan bukanlah antagonisnya. Ternyata isu dan opini yang digelontorkan oleh ibu-ibu itu (sebagian) terbukti, digambarkan dengan scene Dian bersandar mesra di bahu seorang pria berumur yang disebut sebagai suami Bu Lurah, di halaman rumah sakit tempat Bu Lurah dirawat.

Wah *too much spoiler* ya? Ya maaf, harusnya sih sudah pada nonton ya, karena dapat ditonton gratis di Youtube. Jadi *trending topic* pula. Tak salah memang jika filmnya mendapat pujian dari mana-mana dan viral berkat kualitasnya.

Namun muncul juga kontroversi terkait dengan pesan dari ending ceritanya. Ending dari film ini secara gamblang ingin men-*twist* harapan penonton yang secara rasional akan menjagokan Yu Ning sebagai tokoh yang sendirian melawan seluruh "universe" dalam mempertahankan argumen bahwa "informasi di dunia maya tak selalu mutlak benar", dan "harus dikonfirmasi dulu sebelum ditelan mentah-mentah", akhirnya kalah.

Apakah karena *twist* tak terduga itu maka film ini jadi menarik perhatian? Bisa jadi. Tentu setelah faktor sinematografis lainnya (yang jutaan orang awam tak akan begitu jago dalam soal ini).

Yang jelas film ini mengesan di hati jutaan pemirsanya. Kesan tentang kekalahan Yu Ning. Kesan tentang "kemahabeneran netizen" dengan segala komennya di internet.

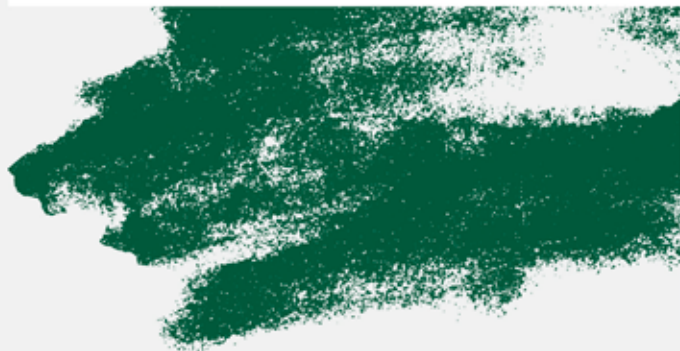
Kekalahan Yu Ning menjadi ending yang mungkin kuat di film, namun melemahkan hati para pejuang literasi dunia maya. Tak ada yang salah dari kaca mata kesenian memang. Namun kesuksesannya terpaksa meninggalkan Yu Ning-Yu Ning lain pejuang literasi digital sendiri, nangis di pojokan.

Ada *public figure* yang mencoba menyoal poin ini. Hasilnya? Mendapat hujatan "netijen". Yu Ning adalah kita, Kominfo. Kita adalah tim Yu Ning yang harus spartan memperjuangkan literasi sendiri, meski jalannya kadang sunyi. Kadang sukses, kadang dimantahkan oleh kenyataan di lapangan.

(Mungkin lebih "sukses" perjuangan "literasi" oleh pedagang bensin eceran di pinggir jalan atau "pertamini". Dengan melakukan "literasi" atas premium atau pertalite, dimasukkan ke botol, mereka bisa meraup untung seribu duaribu rupiah per liternya. Tinggal kulakan ke pom bensin.)

Tenangno pikirmu. Kowe kudu sabar.

(Tenangkan pikiranmu. Kamu harus sabar)



Penulis: FX Bambang Irawan
Redaktur KominfoNext
Humas BAKTI



Tilik

(Ladies on Top)

Short Movie



OFFICIAL SELECTION
Jogja-NETPAC Asian
Film Festival
2019



OFFICIAL SELECTION
World Cinema
Amsterdam
2019



FILM CERITA PENDEK
TERPILIH
Piala Maya
2019

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta & Ravacana Films memproduksikan

Siti Fauziah | Brilliana Desy | Angelina "Pony" | Dyah Mutari | Ludy Syahkharani | Tri Sadarsono

Executive Producer Budi Wibowo, SH, MM. Producer Elena Rosmeisara. Director Wahyu Agung Prasetyo

Writer Bagus Sumananta. Director of Photography Satria Kurnianto. Art Director Rafat Satya. Make Up & Wardrobe Felicia Desi

Sound Recorder Pando Maulana. Sound Designer Aditya Triawan. Music Designer Rody Almasa. Colorist Egha Marismina

Editor Indra Sukmana, Helmi Nur Rasyid. Behind The Scene Ayeha Alma Almera. Poster Artistok Bustamul Choir

Memaknai Pancasila di Film Pendek Tilik

Pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Salah satu cara memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan jaga jarak dan hindari kerumunan. Tetap di rumah dan membatasi pertemuan fisik tentunya menjadi pilihan terbaik. Namun sebagai makhluk sosial, orang Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Masing-masing memiliki kebutuhan sosial (*social needs*), yaitu berinteraksi dengan orang lain. Saat ini, pemenuhan kebutuhan sosial selama pandemi semakin banyak di ruang digital.

Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 adalah "Indonesia Maju", yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia. Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara, tema ini merupakan simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan,

persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 2020, film pendek *Tilik* diunggah di kanal Youtube Ravacana Films, sebuah rumah produksi domisili Yogyakarta. Film produksi Ravacana Films bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibahas terus menerus di Twitter hingga menjadi *trending topic* atau daftar terpopuler, dan grup Whatsapp. Hingga 23 Agustus 2020, jumlah penonton film ini telah mencapai lebih dari 8 juta sejak tayang selama 6 hari.

Mayoritas warganet (*netizen*) mengapresiasi film pendek berdurasi 32 menit ini. Film

pendek ini bukan film yang sengaja dibuat untuk mengisi konten media sosial para pemengaruh (*influencer*), pendengung (*buzzer*), pegiat media sosial, ataupun *government public relations*. Film ini ditayangkan dari festival ke festival di nasional maupun internasional, meskipun terkendala durasi. Video Di Balik Layar *Tilik* telah lebih dulu diunggah tanggal 6 Juni 2020.

Film pendek *Tilik* berkisah tentang rombongan ibu-ibu desa di Bantul yang menempuh perjalanan dengan truk untuk menjenguk Ibu Lurah yang sedang dirawat di rumah sakit di Kota Yogyakarta. Selama di perjalanan, Bu Tejo bergunjing membahas isu perempuan lajang di desa bernama Dian, yang ia dapat dari internet.

Meskipun ceritanya sederhana, film pendek *Tilik* mengandung makna cerminan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ini maknanya:

Sila Kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa

Saat Bu Tejo buang air kecil di toilet masjid, Yu Sam dan Bu Tri shalat Dzuhur. Ibu-ibu lain menunggu dengan sabar. Adegan ini mencerminkan butir *mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing*.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam bahasa Jawa, *tilik* berarti menjenguk orang sakit. Inisiatif Yu Ning mengajak ibu-ibu lain segera menjenguk Ibu Lurah yang sedang sakit, mencerminkan butir *gemar melakukan kegiatan kemanusiaan*.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Meskipun Bu Tejo mampu menyewa bus untuk membawa rombongan ibu-ibu menjenguk Bu Lurah, namun ia tetap ikut rombongan naik truk, dan memberi tips untuk Gotrek, titipan dari suaminya. Adegan ini mencerminkan butir *mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika*.

Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Bu Tejo menawarkan ke rombongan ibu-ibu untuk mampir ke Pasar Besar (Beringharjo) setelah gagal menjenguk Bu Lurah. Ibu-ibu lain pun setuju. Bu Tejo mengamalkan butir *tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain*.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Saat truk mogok, rombongan ibu-ibu pun mendorong truk bersama-sama meskipun Bu Tejo dan Bu Tri tidak ikut. Sikap ibu-ibu ini mencerminkan butir *mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan*.

Tidak hanya di film. Semangat anak muda untuk berkarya, kebersamaan, dan kekeluargaan di proses pembuatan film pendek ini juga mencerminkan kegotongroyongan. Demikian juga dengan mayoritas tanggapan penonton film ini, mencerminkan butir *suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama*.

Momen penayangan *Tilik* di media sosial tidak hanya pas dengan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan himbauan di rumah saja, tapi juga pas setelah ramainya warganet menanggapi cuitan Tjahyo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tjahyo Kumolo berisi tautan daftar film perjuangan di kanal Youtube, yang diunggah secara ilegal tanpa izin pemilik hak ciptanya. Setelah dikritik sineas dan warganet, kemudian ia klarifikasi bahwa tidak mengecek tautan yang diperoleh dari grup WhatsApp, karena suasana kemerdekaan RI maka spontan berbagi di Twitter. Ia pun meminta maaf dan menghapus twitnya.

Pancasila secara wajar dan natural ada di setiap kepribadian orang Indonesia, terlepas dari perdebatan hak kekayaan intelektual yang dianggap pro kapitalis. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dapat berkolaborasi memproduksi film pendek sebagai media sosialisasi program pemerintah di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap jaga jarak, hindari kerumunan, selalu pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun.

Memaknai perjuangan melawan penjajah hingga merdeka di tahun 1945, tidak hanya euforia menonton film di rumah. Bangga buatan Indonesia tidak hanya dimaknai dengan nonton film produksi Indonesia saja. Yang terpenting adalah kemerdekaan dalam berkarya, berkreasi dan berinovasi. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia! Merdeka!



Penulis: Lida Noor Meitania, S.H., M.H.
Pranata Humas Muda

Subkoord. Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial
Direktorat IK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
DITJEN IKP



Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal² yang mengenai ~~peraturan~~
hak kebebasan, d. l. l., ^{selanjutnya} dilaksanakan
dengan tjara saksama dan dalam
tempoh yang sesingkat-singkat
nya.

Djakarta, 17-8-'05
wakil² bangsa Indonesia



4 Tokoh di Balik Proklamasi

Selain tokoh penting seperti **Fatmawati Soekarno** yang bertugas menjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya, dan **Sayuti Melik** yang mengetik teks proklamasi, pertama kali, ada 4 tokoh yang mungkin kamu belum tahu, lho! Ini dia:



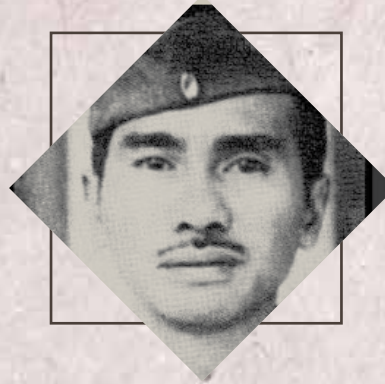
Wikana

Beliau adalah salah satu pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok untuk segera membacakan Proklamasi Kemerdekaan setelah kekalahan Jepang pada Sekutu.



B.M. Diah

Seorang wartawan Indonesia yang berperan penting untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.



Abdul Latief Hendraningrat

Orang yang ditunjuk saat menggerek Bendera Merah Putih saat Proklamasi didampingi **Soehoed Sastro Koesoemo**, seorang pemuda dari barisan pelopor.



Achmad Soebardjo

Berperan dalam melakukan perundingan dengan para pemuda yang menculik Soekarno dan Moh.Hatta dan berhasil meyakinkan para pemuda tersebut untuk mengembalikan Soekarno dan Moh.Hatta ke Jakarta.



Kunker Era Pandemi: Memastikan Puzzle ICT Satukan Negeri

Sebuah catatan Kunjungan Kerja Menteri Johnny G. Plate ke Timur Indonesia

Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memastikan pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK/ICT) berjalan dan tanpa hambatan. Ibarat *puzzle* yang harus disusun menjadi satu-kesatuan, infrastruktur ICT pun demikian, menyambungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya dan satu pulau dengan ribuan pulau lainnya melalui jaringan internet.

Dalam rangka memastikan fasilitas internet tersedia di seluruh pelosok Tanah Air, Kementerian Kominfo terus memonitor pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dibangun, salah satunya dengan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah untuk mengetahui secara langsung manfaat yang dirasakan masyarakat. Tentu dengan harapan *puzzle* ICT menyatukan negeri kita tercinta.



Pembangunan Data Center Bagian dari Transformasi Digital

Bitung, 28 Juli 2020

Suatu kesukacitaan tersendiri bagi Saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara, secara khusus Kota Bitung. Memang ini kunjungan yang sangat spesifik terkait penggelaran atau pembangunan Data Center.

Seperti kita ketahui salah satu implikasi dari COVID-19 atau pandemi *coronavirus* ini bukan saja hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan seperti yang kita ketahui, yaitu penyakitnya dan dampak terhadap berbagai sektor termasuk perekonomian yang luar biasa. Bahkan saat ini kontraksi ekonomi dunia juga mengkhawatirkan. Tetapi ada sisi lain dari COVID-19, yang secara tidak langsung mendorong akselerasi transformasi digital, mendorong percepatan masyarakat kita untuk masuk ke era masyarakat digital dan masyarakat digital ini hanya bisa kita lakukan dengan baik apabila infrastruktur informatika telah digelar secara baik di seluruh wilayah Tanah Air.

Selama ini kita sudah membangun *backbone network* yang tidak saja yang dilakukan oleh operator seluler, pemerintah pun mengambil bagian di dalamnya dengan membangun Palapa Ring Barat, Timur dan Tengah. Kalau kita lihat dari panjangnya penggelaran fiber optik di Indonesia saat ini, itu sudah dibangun sepanjang 348.000 km yang termasuk di dalamnya Palapa Ring sepanjang 12.000 km dan 336.000 km oleh ekosistem Kominfo yaitu operator-operator seluler.

Tetapi apakah itu sudah cukup? Ternyata dengan begitu luas dan besarnya bangsa dan negara kita yang berada di archipelago khatulistiwa ini, kita masih membutuhkan pembangunan yang dikenal dengan namanya *Middle Mile* dan *the Last Mile fiber optic* untuk menghadirkan sinyal di semua titik-titik pemukiman masyarakat dan pelayanan pemerintahan, baik itu oleh Pemerintahan Daerah



seperti Kantor Camat, Kantor Bupati, Kantor Desa, Kantor Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya sampai di wilayah-wilayah ujung di mana adanya atau bermukimnya masyarakat.

Kita perlu menggelar lebih banyak lagi, salah satunya fiber optik atau menggelar melalui pilihan infrastruktur alternatif seperti membangun jaringan radio frekuensi bahkan memanfaatkan satelit. Saat ini Indonesia sudah menggunakan sekitar 5 satelit dengan kapasitas sekitar 30 GB untuk melayani telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan ini pun belum cukup, kita masih harus menyewa 4 satelit lagi. Jadi ada 9 satelit saat ini yang dipakai untuk mendukung telekomunikasi Indonesia. Kementerian Kominfo sedang merancang pembangunan satelit baru yang disebut dengan *High Throughput Satellite* yaitu 150 GB. Apakah itu juga sudah cukup? Belum juga, kita masih membutuhkan *Last Mile* yaitu *Best Transceiver Station* (BTS).

Di Indonesia kita sudah membangun 480.000 BTS yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Namun ternyata, secara administratif dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada internet atau belum ada sinyal 4G. Berdasarkan catatan di Kabupaten Bitung sendiri sudah ada 10. Dari 12.548 tersebut, 9.113-nya berada di wilayah 3T, secara otomatis sebanyak 9.113 desa di wilayah 3T yang selama ini belum ada sinyal. Kalau belum ada sinyal untuk internet berarti kesiapan mereka untuk memasuki transformasi digital juga hampir tidak mungkin atau sangat sulit.

Dalam rangka mengajak masyarakat di 12.548 desa ini, kunjungan kali ini ke Bitung setelah dari Bitung ke Ternate, dari Ternate ke Morotai

yang berbatasan langsung dengan Pasifik Barat sebagai salah satu simpul contoh bagaimana wilayah-wilayah harus dibangun agar nanti pada tahun 2023 dan selambatnya 2024, coverage sinyal 4G kita sudah bisa tersebar merata di seluruh Indonesia berdasarkan kesiapan dananya.

Saya berharap sebelum tahun 2024 berakhir, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, pengelaran backbone jaringan utama untuk mendukung telekomunikasi kita sudah bisa dibangun keseluruhannya. Dengan niat apa? Meningkatkan internetifikasi dan memperkecil disparitas internet antar wilayah. Kalau di telekomunikasi kita sekarang perlu mengenal yang disebut dengan internetifikasi. Ketersediaan internet di wilayah-wilayah khususnya di wilayah pemukiman masyarakat yang jauh dari pusat kota, kabupaten dan disparitasnya memperkecil kesenjangan internet wilayah antarnegara. Nah, inilah tujuan saya datang untuk mengambil beberapa sampel agar proses transformasi digital bisa kita lakukan dengan baik.



Membangun Pusat Data Nasional Di samping itu, selain dari pengelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika, pemerintah juga membangun Pusat Data Nasional. Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.700 pusat data yang tersebar di seluruh Tanah Air, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Di antaranya masih banyak sekali yang belum memenuhi standar. Sehingga, saat ini begitu sulit untuk melakukan pengumpulan atau menghasilkan satu data yang menjadi acuan tunggal pengambilan kebijakan.

Data dari 2.700 pusat data yang tersebar di daerah-daerah ini tidak di dalam satu bahasa yang sama, tidak dalam satu sistem yang sama, mengakibatkan data yang sampai di Pemerintah Pusat harus diolah. Kementerian Kominfo mengolahnya di Data Center Kominfo yang disebut dengan interoperabilitas. Membaca data-data dan menyaring data-data seperti data *cleansing*, dan menyalurkan satu data

kepada Dashboard Kesehatan dan Gugus Tugas.

Belajar dari pengalaman ini, kita perlu membangun satu data yaitu Pusat Data Nasional dalam rangka menghasilkan Satu Data Indonesia, agar pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat dan juga sekaligus untuk mendukung *electronic government* atau Pemerintah berbasis sistem elektronik kita.

Ada beberapa prasyarat untuk menentukan satu wilayah menjadi pilihan Pusat Data Nasional. Pertama, memilih wilayah yang juga menjadi representasi daerah. Indonesia begitu besar, setidaknya ada Kalimantan Timur, Sulawesi yang mewakili Wilayah Timur, Jakarta dan Batam yang mewakili Wilayah Barat. Semua ini hubungannya dengan apa? Dengan pengelaran jaringan-jaringan yang ada.

Kedua, tersedianya infrastruktur yang memadai untuk transmisi data, karena Data Center

merupakan data yang jumlahnya sangat besar. Dibutuhkan infrastruktur fiber *optic* yang betul-betul tersedia dengan baik dan tidak dari satu sumber. Jadi, ada beberapa saluran untuk tersedianya fiber optik. Di Sulawesi Utara sudah tersedia walaupun belum semuanya dengan berbagai jenis jalur dan ada tantangan-tantangan vulkanis yang harus menjadi perhatian kita.

Selain itu, pasti yang harus diperhatikan adalah ketersediaan *power supply*. Data center tanpa tersedianya *power supply* yang memadai sulit, bukan saja jumlah *power supply*-nya, tetapi sumber *power supply* pun demikian, kalau satu mati harus ada *redundancy*-nya dari sumber yang lain.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aksesnya, karena Data Center merupakan satu pusat data untuk negara dan penting sekali. Data Center sebagai fasilitas publik strategis maka aksesnya pun harus mudah; mudah untuk

menjaganya, mudah untuk mengamankannya, dan yang pasti terkait dengan keamanan dan pertahanan.

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa tersedianya infrastruktur telekomunikasi informatika yang memadai, *power supply* dan *security system* juga yang memadai. Itulah tiga hal utama.

Untuk lokasinya sendiri juga harus dilihat bagaimana riwayat dan background lokasi dari berbagai jenis gempa. Di Jakarta misalnya kalau kita lihat mundur data gempa 500 tahun lalu. Nah, mudah-mudahan di Bitung ada setidaknya 100 tahun mundur seperti apa data gempa, data tsunami, data banjir dan data lain sebagainya itu harus dilihat juga. Juga harus ada pengujian terhadap tanahnya, artinya daya tahan tanah terhadap wilayah vulkanis seperti ini.

Faktor-faktor ini semuanya akan menjadi pertimbangan, keputusan teknis dan secara keekonomian. Saya melihat secara teknis dan secara ekonomi di mana efisiensi yang bisa dilakukan, semua pertimbangan yang sudah selesai dan menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk memilih alternatif. Alternatif pertama tentu ada 4 Pusat Data Nasional; di ibukota sekarang (Jabodetabek), ibukota negara baru, Kepulauan Riau di Batam, dan keempat di Bitung.





Foto : AntaraFoto

Menyiapkan Desa Memasuki Transformasi Digital

Video conference dengan warga Morotai,
29 Juli 2020

Kunjungan ke Morotai hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf sekali kepada Pak Bupati Kepulauan Morotai dan seluruh masyarakat, memang saya berniat betul mau ke Morotai, tapi saya harus kembali ke Jakarta karena ada sidang kabinet yang penting sekali, berhubungan juga dengan Morotai dan wilayah 3T lainnya di Indonesia, yaitu Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemerintah pusat terutama Presiden secara sungguh-sungguh ingin menyelesaikan seluruh infrastruktur nasional. Tentu termasuk infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Hasil dari pengamatan saya melalui evaluasi menyeluruh, pembangunan yang sudah luar biasa dilakukan selama ini masih perlu ditindaklanjuti. Sudah hebat, sudah luar biasa tapi masih perlu diteruskan karena masih ada ribuan desa yang belum tersedia sinyal 4G sehingga belum ada kemampuan internet. Sedangkan COVID-19 merangsang dunia, Indonesia, dan Morotai juga untuk melakukan percepatan transformasi digital. Tanpa tersedianya infrastruktur TIK yang memadai tentu akan berkendala besar untuk memasuki era transformasi digital.

Dari data yang saya peroleh, Provinsi Maluku Utara ada 347 BTS yang dibangun atau harus disediakan, dan masih kekurangan 17 BTS untuk Morotai. Saya kira yang 17 adalah bagian dari 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang harus kita bangun infrastruktur TIK-nya, baik itu fiber optic maupun melalui microwave link, BTS dan termasuk akses internetnya. Mudah-mudahan, rencana kita untuk menyelesaikan penggelaran dari infrastruktur ICT selain dari *backbone*, maka kita juga nanti membangun *middle mile* dan *last mile* termasuk sampai di Morotai.

Mengapa di Morotai? Di samping rencana-rencana hebat yang disiapkan atau dilakukan oleh Bupati, Morotai adalah bagian strategis dari wilayah nasional kita. Morotai berada di wilayah perbatasan dengan Pasifik Barat, apalagi wilayah ini juga bagian dari alur laut kepulauan Indonesia. Kepulauan Morotai juga bisa saja di suatu waktu menjadi *training ground military exercise international*, padahal di dasar lautnya banyak penggelaran fiber optik yang kita sediakan. Jadi, saya harus betul-betul memetakan agar di sisi yang satu wilayah kedaulatan bisa terjaga dengan baik, manuver-manuver militer training nanti bisa dilakukan dengan baik, tapi di sisi yang lain infrastruktur TIK kita terjaga dengan baik, yaitu wilayah yang tidak mudah dasar lautnya.

Dasar laut dengan palung-palung yang dalam, karang dan arus bawah laut yang luar biasa, serta termasuk wilayah vulkanis yang bisa saja terjadi



aktivitas vulkanis di bawah laut. Jika aktivitas vulkanis di atas laut kita bisa melihat langsung gunung meletus, api dan asap naik ke udara. Tetapi kalau gunungnya meletus di bawah laut maka tidak kelihatan di atas, tapi panas di sekelilingnya. Nah, panas di sekelilingnya bisa merusak infrastruktur yang kita bangun. Begitu juga dengan arus bawah laut, kita tidak lihat di atasnya tetapi dibawahnya begitu kencang. Sehingga perlu betul memperhatikan ekosistem kondisi geologi dan geografis yang ada di Morotai.

Morotai begitu penting karena juga sebagai pintu gerbang depan, apalagi rencana menjadikan Morotai akan menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata penting di Indonesia yang sudah pipeline-nya pemerintah.

Morotai juga menjadi salah satu titik referensi dan contoh untuk wilayah-wilayah 3T lainnya dalam rangka pengembangan dan pembangunan infrastruktur TIK nasional kita, dan dalam rangka mengajak serta wilayah 3T, khususnya masyarakat, para petani, para nelayan, UMKM, ultra mikro dan peternak untuk bagaimana mereka diajak serta untuk masuk ke era baru; era digitalisasi. Saya pasti akan kesana lagi.

Upayakan Subsidi Silang

Kementerian Kominfo diberi mandat membangun infrastruktur, provider dan regulator, dan secara bersama mengatur regulasi-regulasinya. Untuk downstream, pelaksanaan mikro bisnis atau usahanya adalah operator seluler. Seperti tarif pulsa (pengaturannya, red.) berada di operator seluler, bukan di Kominfo.

Namun pada saat COVID-19 ini, masyarakat dituntut untuk melakukan percepatan bertransformasi. Belum tentu secara finansial mereka siap, maka saya juga berbicara dengan Ibu Menteri Keuangan tentang mekanismenya seperti apa, perlu dicarikan mekanisme untuk wilayah 3T agar tidak menjadi beban bagi belanja rumah tangga masyarakat.

Berbagai macam mekanismenya tentu nanti akan kita diskusikan, tetapi untuk jangka pendek saat ini bagi para siswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya sudah menyampaikan untuk memanfaatkan dan menggunakan dana BOS untuk belanja pulsa. Kemudian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga sudah menyampaikan Dana Desa boleh dipakai untuk penggunaan seperti ini. Bahkan Menteri Keuangan melihat bagaimana diatur pos-pos pembiayaan alokasi dana desa untuk melakukan subsidi silang bagi biaya telekomunikasi atau pulsa di masyarakat, tapi ini masih dalam bentuk diskusi-diskusi untuk mencari bentuk bagaimana yang tepat untuk diterapkan.

Seperti kita ketahui ada puluhan ribu desa dan kelurahan, berarti jutaan masyarakat nanti akan terlibat, karenanya pasti melibatkan dana yang jumlahnya juga sangat besar. Di saat yang sama ada tekanan fiskal. Kalau kehadiran pulsa gratis dan akses internet gratis memang dimungkinkan, tetapi hanya wilayah-wilayah yang sangat khusus untuk pusat pelayanan publik.

Kalau BTS pelayanannya untuk masyarakat dengan radius yang besar, sedangkan akses internet untuk pelayanan publik yang radiusnya kecil sekitar 100 meter dan dihubungkan dengan satelit. Akses internet bisa gratis tapi bukan dipakai oleh publik, karena digunakan oleh Puskesmas, kantor-kantor desa dan pelayanan publik lainnya yang belum ada internet. Tapi kalau mau gratis untuk internet wilayah, maka saluran pembiayaannya melalui pos-pos anggaran pemerintah, bisa pemerintah pusat atau daerah.

Barangkali juga Dinas Kominfo daerah menyiapkan bagaimana penganggaran yang nanti disampaikan kepada Menteri

Kuangan di dalam perimbangan dana pusat dan daerah untuk alokasikan sebagiannya untuk 'subsidi atau jenis pembiayaan' pulsa bagi masyarakat setempat yang memang sangat diperlukan untuk bagian dari program perlindungan sosial.

Berdasarkan data yang ada dan persetujuan pembiayaan untuk anggaran tahun 2021, kita harapkan pembangunan BTS atau akses internet bisa dilakukan lebih cepat dengan pola-pola klaster, sehingga di tahun 2021 dan 2022 kita bisa menyelesaikan sebagian terbesar dari keperluan untuk mengisi *blankspot* di Indonesia, dan di pertengahan atau kuartal tahun 2023 nanti mudah-mudahan sudah bisa menggunakan *high throughput satellite* guna menjangkau wilayah-wilayah yang sangat jauh, sangat terpencil atau sangat sulit.

Bagi masyarakat Morotai, saya tentu berharap suatu saat saya ke Morotai, daerah dengan riwayat dan sejarahnya yang begitu panjang, pengalaman-pengalaman dan

sumber daya yang dimiliki harusnya bisa dikelola untuk akselerasi peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Morotai. Saya meyakini dibawah *leadership* Pak Bupati yang didukung juga dengan pengalaman yang begitu luas di bidang mikro ekonomis atau dunia usaha, saya percaya akan bisa menjadi panutan untuk mendorong masyarakat dalam rangka akselerasi pembangunan wilayah. Kementerian Kominfo akan selalu dukung.

Tugas saya sebetulnya menyambung semua *puzzle* infrastruktur yang selama ini belum selesai agar bangsa Indonesia menjadi satu utuh yang sama-sama kita cintai. Saya juga terlibat secara aktif mendorong Bangsa Buatan Indonesia dan mendorong agar cinta hasil produksi Indonesia mengajak serta seluruh usaha mikro, menengah kecil dan ultra mikro untuk masuk ke era baru, era digital agar masyarakat kecil kita bisa diajak bermigrasi masuk ke ekonomi digital yang dari waktu ke waktu selalu bertumbuh dan berkembang luar biasa.

Foto : Unsplash | Kiteque



Bagi anak-anak sekolah, Saya tentu titip pesan manfaatkan infrastruktur yang kita miliki untuk digunakan secara bermanfaat, gunakan itu dengan benar demi kepentingan yang baik, manfaatkan bagi kemajuan dan pembangunan.

Jangan sampai infrastruktur, ruang digital dan telekomunikasi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya untuk tempat memproduksi hoaks atau *handphone* kita berselancar di ruang maya untuk konten-konten yang tidak bermanfaat. Gunakanlah ruang digital ini agar kita bisa melakukan akselerasi peningkatan sumber daya manusia, khususnya anak-anak kelompok milenial agar setara, sejajar dan bisa bersaing dengan kelompok milenial dari bangsa-bangsa lain.

“

Gunakanlah ruang digital ini agar kita bisa melakukan akselerasi peningkatan sumber daya manusia, khususnya anak-anak kelompok milenial agar setara, sejajar dan bisa bersaing dengan kelompok milenial dari bangsa-bangsa lain.



Rencana Pembukaan Bioskop, Ini Rekomendasi Gugus Tugas

- **JAKARTA** - Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa rencana pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta telah melalui proses kajian oleh Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 dengan mempertimbangkan aspek, kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi seperti bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan serta kesiapan fasilitas pendukungnya dan juga penyelenggaraan termasuk masyarakat itu sendiri," ujar Wiku dalam keterangannya di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta, pada Rabu (26/08/2020).

Wiku juga menjelaskan persiapan protokol, infrastruktur dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh Tim Pakar dan wajib dipatuhi oleh penyedia layanan bioskop, antara lain:

- 1. Skrining usia dan kondisi kesehatan calon pengunjung.** Yang diperbolehkan hadir adalah usia >12 tahun - ≤ 60 tahun, dalam keadaan sehat serta tidak memiliki penyakit
- 2. Online ticketing**
- 3. Kapasitas penonton ≤ 50 persen**
- 4. Menyediakan penanda antrian** dengan jarak 1,5 meter antar individu saat masuk dan keluar area bioskop dan ruangan teater
- 5. Semua pengunjung dan petugas di area bioskop wajib mengikuti protokol kesehatan (3M).** Saat di dalam ruangan teater penonton dan petugas disarankan menggunakan *face shield*. Petugas wajib mengobservasi kepatuhan
- 6. Menutup fasilitas game arcade** (bila ada) untuk sementara
- 7. Menyiapkan alat pemeriksa suhu tubuh** pada pintu masuk bioskop
- 8. Menentukan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda**
- 9. Menyediakan fasilitas cuci tangan** pada pintu masuk, pintu keluar area bioskop, ruangan teater, serta titik kerumun lainnya dengan wastafel/wastafel portable atau *hand sanitizer* berbasis alkohol minimal 70%

10. **Menyediakan masker** yang memiliki efektivitas filtrasi minimal setara masker bedah, *face shield* dan *hand sanitizer* untuk pengunjung yang akan menonton film
11. **Rutin membersihkan permukaan benda-benda** seperti pegangan pintu, rail tangga dan fasilitas umum yang rawan tersentuh/ disentuh secara berkala minimal satu jam sekali
12. Memastikan **kipas exhaust untuk aliran udara keluar** pada toilet bekerja dengan baik
13. Mengimbau pengunjung untuk **langsung pulang dan tidak berkumpul** setelah pertunjukan film
14. Pada daerah berisiko tinggi penularan, misalnya ruang dengan sistem tata udara dan ventilasi mekanik, dapat melakukan **peningkatan jumlah udara segar dan laju sirkulasi penggantian udara dengan melengkapi filtrasi dengan HEPA/MERV-13**, menambahkan pembersih udara *portable*, menjalankan sistem tata udara lebih lama, baik sebelum dan setelah jam buka



Konser opera di State Theatre of Hesse di Wiesbaden, Jerman, pada akhir Mei lalu yang dibatasi hanya 200 pengunjung. Dalam situasi normal, gedung pertunjukan ini dapat menampung hingga 1000 pengunjung. Sumber: Gordon Welters for The New York Times



Peringatan agar pengunjung selalu memakai masker selama pertunjukan berlangsung dipasang di area pintu masuk. Sumber: Gordon Welters for The New York Times

Selain itu, Wiku juga memberikan saran dan rekomendasi tambahan untuk aktivitas di dalam ruang teater bioskop, antara lain:

Menampilkan protokol kesehatan (3M) ditambah menggunakan *face shield*, tidak berbicara, tidak tertawa, tidak makan dan minum yang wajib ditaati sebelum, saat dan setelah menonton film.

Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan monitor infrared di dalam ruangan teater untuk mengobservasi kepatuhan penonton terhadap peraturan yang ditetapkan serta memberlakukan sanksi penghentian pertunjukan film bila ada penonton yang tidak patuh.

Menetapkan waktu kosong minimal 60 menit antar pertunjukan film agar ruangan teater dapat disanitasi

Terakhir, Wiku menambahkan bahwa Satgas pusat maupun daerah akan memastikan seluruh prosesnya dilakukan secara bertahap, bertanggung jawab dan transparan sehingga pembukaan bioskop betul-betul aman bagi masyarakat luas.

"Seluruh prosesnya selalu mengutamakan keselamatan masyarakat luas. Kami selalu mendampingi bersama pemerintah daerah agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik," tutup Wiku.

Bawa Pesan Nilai Kebersamaan & Perjuangan, Pemerintah Terbitkan 4 Seri Prangko



Foto : Unsplash | Fang Wei Lin

gen,
an.



Pemerintah menerbitkan empat seri prangko dalam momentum Peringatan 75 tahun Kemerdekaan RI untuk mengembangkan nuansa kebersamaan dan nilai perjuangan. Keempat seri itu Prangko Seri Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 75 Tahun Indonesia Merdeka, Penanggulangan COVID-19, serta Artis dan Grup Musik Ternama.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan prangko menjadi bagian penting bagi sejarah bangsa. Prangko bukan sekadar alat bayar pengiriman benda pos. Namun, menjadi media visualisasi keberagaman masyarakat dan kedaulatan negara.

"Prangko memiliki aktualitas atau peristiwa yang terjadi suatu waktu. Sekalipun kepingnya sangat kecil tapi sangat sarat mengandung berbagai fenomena," katanya dalam Peluncuran Prangko Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 75 Tahun Indonesia Merdeka, Penanggulangan COVID-19, serta Artis dan Grup Musik Ternama secara virtual di Jakarta, Rabu (19/08/2020).

Peluncuran 4 seri prangko secara bersamaan menurut Wakil Presiden merupakan bagian dari rangkaian Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.

"Sejalan dengan teknologi informasi terjadi pergeseran cara berkomunikasi masyarakat, prangko tidak banyak lagi digunakan. Namun, prangko masih menjadi media untuk mengabadikan momen khusus bersejarah, diplomasi dan hubungan internasional," tutur Wapres.



Menurut Wakil Presiden sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus tetap maju, produktif dan berkarya di tengah pandemi COVID-19. "Kita sebagai bangsa yang besar harus dapat maju, produktif, dan berkarya serta berinovasi di berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang seni dan budaya," tandasnya.

Wakil Presiden menyatakan penerbitan Seri Penanggulangan COVID-19 merupakan bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19. "Salah satu wujud apresiasi Pemerintah kepada para dokter dan tenaga medis yang telah menunjukkan semangat dan integritas yang tinggi untuk membantu sesama dalam menghadapi pandemi," tuturnya.

Selain itu, prangko artis menjadi bentuk apresiasi kepada seniman dan artis musik agar dapat berkarya dan berkreasi untuk menginspirasi bangsa dalam melawan pandemi. "Semoga para seniman dan musisi dapat terus berkarya, mengobarkan semangat berjuang menginspirasi Bangsa Indonesia," tuturnya sebelum menandatangani Sampul Hari Pertama Prangko 4 seri yang diluncurkan.



Pesan dalam 4 Seri Prangko

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penerbitan keempat seri prangko tersebut dilaksanakan secara bersamaan karena semangat dan pesan yang disampaikan selaras dengan nuansa dan nilai-nilai perjuangan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.

"Prangko memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan internasional, pendidikan, dan sebagai media promosi bagi segala kekayaan dan keunggulan bangsa dan negara kita serta menjadi alat untuk mengabadikan peristiwa yang sifatnya fenomenal," paparnya.

Penerbitan 4 seri prangko oleh Kementerian Kominfo mewakili Negara dan Pemerintah dimaksudkan menandai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. "Prangko Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tidak saja memiliki nilai intrinsik, nilai nominal namun juga nilai memorabilia, menjadi kenangan dalam sejarah panjang kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, kenangan akan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun ini menjadi menarik karena selain mengenang perjuangan bangsa dan negara, melawan pandemi COVID-19. "Mengenang pahlawan kemerdekaan sekaligus mengenang jasa pahlawan kesehatan dalam darurat kesehatan di zaman sekarang yang juga mempengaruhi jiwa dan raga memerangi pandemi COVID-19," tegasnya.

Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden menurut Menteri Johnny sangat penting dan fenomenal sebagai dokumen negara berupa prangko istimewa Presiden dan Wakil Presiden. "Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden selalu ditunggu kehadirannya di negara kita. Presiden dan Wakil Presiden selalu diabadikan ketokohnya dalam bentuk prangko khusus," jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, negara-negara lain juga memiliki kebiasaan dimana penghormatan kepada kepala negaranya dilakukan antara lain dalam penerbitan prangko. "Prangko seri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah bentuk penghormatan kita kepada beliau sebagai kepala negara yang telah dipilih oleh Rakyat Indonesia. Tentu melalui sirkulasi demokrasi yang demikian hebatnya," tegasnya.

Mengenai Prangko Seri Penanggulangan COVID-19, Menteri Johnny menjelaskan sebagai apresiasi kepada tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah berjuang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan masih terus berjuang dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita patut mengungkapkan rasa terima kasih kepada tenaga kesehatan dan semua pihak yang terlibat yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi saat ini. Penerbitan prangko terkait COVID-19 ini menjadi peristiwa yang sangat langka," jelasnya.

Adapun Prangko Seri Artis, Grup Musik Ternama yang bertujuan memberikan penghargaan kepada para artis dan grup musik ternama yang telah berjasa dalam mengembangkan seni musik Indonesia, menurut Menteri Kominfo hal itu ditujukan untuk mendorong kemajuan dunia seni musik serta mensosialisasikan nilai-nilai budaya luhur dan perjuangan di tanah air melalui lagu-lagu mereka.

"Prangko seri tokoh musik dan artis ini menampilkan empat gambar tokoh artis musisi ternama di Indonesia, yaitu Titiok Puspa, Gesang (alm.), Gombloh (alm.), dan Chrisye (alm.). Sedangkan empat gambar grup musik ternama, terdiri atas Koes Plus, Panbers, God Bless, dan Bimbo," jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan, musisi ternama yang mendapat penghargaan untuk diprangkakan, telah menciptakan banyak lagu. "Di antaranya lagu bertema COVID-19, seperti lagu yang digubah oleh Titiok Puspa dan kelompok Bimbo. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara keberadaan artis dan musisi Indonesia dengan perjuangan melawan pandemi COVID-19," jelasnya.





**Pemerintah Dorong
Pengembangan Telemedis
untuk Akselerasi
Transformasi Digital**



Pengembangan solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu terobosan yang perlu terus dikembangkan di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan layanan telemedis menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat membuka Diskusi Publik Telemedis untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Sabtu (22/08/2020).

Menteri Kominfo menilai telemedis sebagai layanan kesehatan jarak jauh memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan berdiskusi tanpa harus bertatap muka. "Dengan cara ini, tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis," ujarnya.

Mengutip data McKinsey (2000), Menteri Johnny menyatakan bahwa 44% responden menyatakan bahwa mereka beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. "Katadata juga mencatat terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedis sebesar 600% selama masa pandemi," ungkapnya.

Menurut Menteri Kominfo, kebiasaan baru di bidang kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa pandemi COVID-19 adalah katalis atau faktor yang mempercepat transformasi digital.

"Momentum yang menurut arahan Bapak Presiden Joko Widodo tidak boleh dilewatkan dan justru harus dimanfaatkan. Upaya ini tercakup dalam bingkai besar agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional," ujarnya.

Dalam agenda itu, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas sebagai berikut:

Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 Desa/Kelurahan dan 150.000 titik layanan publik (termasuk layanan kesehatan) yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.

Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia; serta *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio untuk efisiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.



Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level “literasi digital”, “talenta digital”, sampai level “kepemimpinan era digital”.

Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan *startup* digital.

Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, terutama Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi/penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.

Menteri Johnny menilai topik seminar ini sangat relevan di tengah kondisi Indonesia yang sedang menangani pandemi COVID-19 dalam spirit optimisme. Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan adanya terobosan di bidang medis agar bisa segera keluar dari kondisi pandemik.

“Saya meyakini bahwa seminar nasional telemedis ini akan memunculkan ide-ide inovatif dan progresif, sejalan dengan spirit percepatan transformasi digital nasional. Terobosan-terobosan baru di bidang medis sangat dinantikan untuk segera keluar dari pandemi. Terobosan-terobosan ini jugalah yang akan memperkuat optimisme untuk segera keluar dari kontraksi ekonomi,” ujarnya.

Kolaborasi

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sampai Jumat, 21 Agustus 2020, terdapat 149.408 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia; dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 102.991 orang atau sekitar 69% dari kasus konfirmasi positif.

“Data ini perlu dimaknai sebagai sebuah dorongan untuk terus mencari terobosan penanganan COVID-19 secara lebih efektif, sekaligus lebih efisien,” tutur Menteri Johnny.

Ada banyak teknologi yang tengah dikembangkan untuk berbagai tujuan, mulai dari *symptoms check* sampai deteksi lebih dari 600 jenis penyakit secara digital. “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), *Big Data Analytics*, *Internet of Things*, dan sederet teknologi digital lainnya membuka kesempatan-kesempatan baru dalam perbaikan kualitas dan peningkatan kecepatan layanan kesehatan,” tegas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, penggunaan layanan telemedis juga dapat membantu penanganan COVID-19 secara lebih luas. “Cara ini, misalnya, bisa membantu untuk mendeteksi hingga ke tahapan apakah seorang pasien harus menjalani tes PCR atau tidak. Lebih jauh lagi, bantuan konsultasi telemedis bisa menekan jumlah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya,” tuturnya.



“Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit!”

Menteri Kominfo menyatakan, percepatan transformasi digital nasional tentu mampu memperluas dan memperbaiki kualitas layanan telemedis, bahkan diharapkan dapat menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Untuk mencapai tujuan tersebut, saya sangat berharap kerjasama antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, IDI, ATENSI, beserta ekosistem terkait lainnya, akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kerjasama ini tentu perlu dilandasi dengan nafas kolaboratif dan berkelanjutan,” harapnya.

Di akhir sambutan, Menteri Kominfo mengajak semua peserta menggelorakan semangat kebangkitan dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia.

“Mari kita terus gelorakan kebangkitan kita sebagai bangsa yang besar. Serta diiringi keyakinan dan tekad kuat untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia di tahun 2045. Mari dengan spirit yang sama: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit! Bangkit Menuju Indonesia Maju!” tegasnya.

Transformasi Digital, Peluang Pramuwisata Kembangkan Tur Virtual

Foto : Unsplash | Cristian Palmer

Foto: Unsplash | Sebastian Pena Lembarri



PARIWISATA

Pemerintah mendorong para pemandu wisata atau pramuwisata untuk melakukan tur virtual interaktif sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia. Hal itu menjadi peluang memanfaatkan transformasi digital yang tengah berlangsung di Indonesia.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, mengungkapkan pandemi COVID-19 telah mengakselerasi perkembangan teknologi, salah satunya di sektor pariwisata. "Maka, kegiatan tur virtual interaktif dapat menjadi alternatif bagi para pramuwisata agar bisa terus berkarya sekaligus memperkenalkan pariwisata daerahnya kepada wisatawan," kata Neil dalam sosialisasi "Transformasi Digital: Tur Virtual Interaktif" bertajuk "Sinergi Transformasi Digital sebagai Langkah Memperkuat Ekosistem Digital Kepariwisata" di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (22/08/2020).

Tur virtual interaktif adalah kegiatan wisata di mana wisatawan dan pramuwisata dapat saling berinteraksi sambil menikmati potensi wisata yang ada dalam suatu destinasi wisata lewat *platform* sosial media atau aplikasi video conference seperti Zoom.

"Tujuan pengembangan tur virtual interaktif ini adalah untuk membangkitkan pariwisata Indonesia di saat pandemi. Kedua memberikan alternatif hiburan lain atau teaser untuk masyarakat agar tergerak berwisata kembali dengan tidak menghilangkan sensasi dan pengalaman ketika berwisata langsung mempromosikan wisata Indonesia dan menciptakan ekosistem digital di sektor kepariwisataan," kata Neil.

Sarana Edukasi

Neil menambahkan, selain membangkitkan potensi wisata Tanah Air yang terpuruk, tur virtual interaktif juga dapat meningkatkan devisa negara. Tidak hanya sampai di situ, Neil pun menilai tur



Foto : Unsplash | Stem

virtual interaktif juga dapat menjadi sarana edukasi wisatawan mengenai tradisi dan budaya Indonesia. Jadi kami berharap juga edukasi di bidang sejarah akan lebih efektif jika dilakukan oleh orang yang tinggal di tempatnya langsung dan diterangkan dengan cara yang menarik dan interaktif. Tentunya ini akan membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menuturkan segmen tur virtual interaktif juga menjadi perhatian Kemenparekraf/Baparekraf dalam memberikan pelatihan kepada pramuwisata. “Selain memberikan pelatihan terkait protokol kesehatan, kami juga memberikan pelatihan tur virtual interaktif. Bagaimana cara mengemas, menceritakan via video, dan menarasikan potensi-potensi yang ada di daerah pramuwisata dengan semenarik mungkin,” ujar Wisnu.

Webinar ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku wisata yang telah mencoba melaksanakan dan menawarkan paket tur virtual interaktif. Di antaranya Reza

Permadi selaku Chief Operation Officer dan Co-Founder Atourin. Reza mengatakan, sejak terjadinya pandemi COVID-19, Atourin menawarkan paket tur virtual interaktif kepada konsumennya. Tur interaktif ini juga menjadi sarana bagi wisatawan untuk berbelanja souvenir khas daerah yang ia kunjungi.

Selain itu, Reza menyebut tur virtual interaktif ini menjadi simulasi apa saja potensi wisata yang dapat dirasakan oleh wisatawan ketika telah diperbolehkan kembali untuk bepergian. “Jadi wisata virtual bukan menggantikan wisata pada umumnya tapi sebagai persiapan bagi wisatawan sebelum berkunjung ke destinasi wisata nanti,” ujar Reza.

Hal senada juga diungkapkan oleh Vice President Divisi Keagenan & Tur PT PELNI, Budi Santoso. Budi menyebutkan sejak dua bulan yang lalu, pihaknya telah menawarkan paket wisata virtual untuk melihat berbagai bagian kapal.

“Kelebihan dari tur virtual ini kita bisa membawa peserta ke lokasi terlarang yang mana kalau dalam tur secara fisik mereka tidak diperbolehkan masuk. Misalnya kamar mesin di kapal itu bisa kita lihat seperti apa di dalamnya secara virtual,” jelas Budi.



Sinergitas Ekosistem Digital

Turut hadir dalam webinar ini Ketua umum DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Sangtu Subaya, yang mengungkapkan perlu adanya sinergitas dalam rangka membentuk ekosistem digital dari tur virtual. "Kami mendorong agar ekosistem ini terbentuk supaya anggota kami para pramuwisata bisa terus berkarya dan tetap produktif di masa pandemi," ungkap Sangtu. Hal senada juga diungkapkan oleh Chief Executive Officer sekaligus pendiri *outing.id* dan Wisata Sekolah, Irwan Tamrin. Menurutnya, kondisi pandemi COVID-19 memaksa seluruh sektor, terutama sektor pariwisata, mengakselerasi digitalisasi berbagai kegiatan berwisata.

"Akselerasi digital ini menurut saya bisa menjadi momentum. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi untuk saling support agar pariwisata bisa jadi leading sector," ucap Irwan.

Mengenai ketersediaan ekosistem tur virtual, Chief Marketing Officer Traveloka sekaligus CEO Traveloka Xperience, Christian Suwarna menyatakan pihaknya telah menyediakan platform digital yang dinamai Traveloka Online Xperience. "Kami bertindak sebagai platform yang

diisi pramuwisata dengan *demand* dari konsumen, dan kita buat *platform* agar kedua pihak saling bertemu. Jadi para tour guide ini cukup memastikan kontennya kuat untuk menarik konsumen," tutur Christian.

Perkuat Ketersediaan Jaringan Internet

Di samping itu, Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Ari Soegeng Wahyuniarti, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat ketersediaan jaringan internet di berbagai tempat di Indonesia. Terutama di pulau terluar dan daerah wisata yang belum terjangkau akses internet.

"Kami akan melakukan pemerataan akses infrastruktur telekomunikasi dan informasi di perbatasan dan lain sebagainya. Termasuk desa wisata, dan ini secara bertahap akan kami lakukan pemerataan agar tempat-tempat yang sulit dijamah dapat diakses melalui tur virtual digital," ujar Ari.

Acara ini kemudian diakhiri dengan demonstrasi tur virtual interaktif oleh Jakarta Good Guide di Taman Pemakaman Khusus atau Ereveld Menteng Pulo. Di mana di lokasi ini dimakamkan para tentara KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda yang gugur pada Perang Dunia ke-II.

Kominfo Raih Opini WTP 4 Kali Berturut- turut

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini diraih Kominfo empat kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Hal ini disampaikan Menkominfo Johnny G Plate dalam penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kominfo tahun 2019. Ini merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK berdasarkan empat standar pemeriksaan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Hal ini patut kita pertahankan, karena perolehan opini WTP adalah suatu kewajiban atas pengelolaan keuangan negara," kata Johnny dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020).

Johnny mengatakan tidak cukup bagi Kominfo untuk hanya mendapatkan opini WTP karena tugas kementerian yang lebih penting adalah memastikan penyelenggaraan pembangunan negara dilakukan tepat waktu dan



tepat sasaran serta bisa dinikmati masyarakat.

Pencapaian Kominfo juga diapresiasi BPK. Anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan Kominfo memiliki respons yang cepat dalam memberikan data dan pemeriksaan bisa selesai lebih cepat dibanding kementerian lain.

Tapi BPK juga memiliki beberapa catatan dan rekomendasi untuk Kominfo yang bisa segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah masalah perizinan pita lebar.

"Berikutnya tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, satu saja masalahnya tentang pita lebar yang di sini tertulis bagaimana perpanjangan izinnya harus diurus," kata Achsanul dalam kesempatan yang sama.

"Tentang izin, tentang penerapan sanksinya, perusahaannya

juga sudah disebut oleh tim. Menindaklanjuti ini tidak sulit, ini saya lihat dari kualitas temuan ini tidak sulit," sambungnya.

Achsanul juga mengatakan BPK akan memeriksa proyek Palapa Ring lebih teliti lagi sebelum memberikan opini, dan saat ini baru dimasukkan dalam catatan laporan keuangan. BPK juga menyarankan Kominfo untuk menggandeng RRI dan TVRI dalam program belajar online atau e-learning di tengah pandemi COVID-19.

"Tolong dua institusi ini walau secara struktural tidak berada di bawah bapak, tapi secara fungsional dia ada di bawah kendali bapak," kata Achsanul. "Maksimalkan peran TVRI dan RRI agar lebih bermanfaat untuk kepentingan komunikasi dan pencerdasan masyarakat Indonesia," pungkasnya.



Mudahkan PJJ, Kemenkominfo Targetkan Layanan 4G di 12.548 Desa



Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif berbicara dalam webinar bertema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Wilayah 3T antara Harapan dan Kenyataan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

"Jadi targetnya di akhir Tahun 2022, seluruh desa ini sudah selesai pembangunannya sehingga bisa terjangkau dengan layanan 4G," kata Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif dalam webinar bertema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Wilayah 3T antara Harapan dan Kenyataan di Jakarta, Selasa.

Terkait dengan layanan 4G tersebut, Kemkominfo berupaya mempermudah jangkauan internet di

seluruh desa di Indonesia sehingga lebih memudahkan akses informasi secara daring, terutama untuk PJJ daring di tengah pandemi COVID-19. Ia mengatakan dari 83.218 desa di Indonesia, masih ada 12.548 desa yang belum mendapatkan layanan 4G.

Layanan 4G tersebut, menurut dia, penting diupayakan karena memiliki kecepatan akses cukup cepat sehingga siswa di sekolah maupun di pesantren, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mengikuti PJJ secara daring dengan lebih mudah.

"Nah, ini tahapan (pembangunan, red.) yang dikomitmenkan Pak Menteri kepada Presiden di mana ia menargetkan penyelesaian 9.113 di akhir tahun 2022. Jadi di tahun 2020, ada

1.200 desa yang kami targetkan selesai bisa 4G, lalu meningkat di 2021 ada 5.409 desa. Ini secara akumulatif angkanya. Dan terakhir di 2022 9.113 di daerah 3T ini bisa terselesaikan semuanya," katanya.

Selain layanan 4G, pemerintah juga berupaya menyiapkan layanan fix broadband berupa Wifi di seluruh layanan publik di 150 ribu titik di seluruh Indonesia. "Layanan publik ini bisa berupa sekolah, pesantren, dan ini semua layanannya gratis," katanya.

Ia menjelaskan tentang penggunaan layanan publik itu. "Berbeda dengan 4G di mana penggunaannya ini wajib mengikuti ketentuan yang ada di pasar, yaitu membayar tarif pulsa. Tapi berbeda dengan WiFi, yang dibangun hanya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemda, termasuk di kantor-kantor desa, fasilitas kesehatan di puskesmas-puskesmas, di polsek dan lainnya. Ini sebanyak 150 ribu titik," kata dia.

Sumber: [https://www.antaraneews.com/berita/1676494/mudahan-pjj-kemenkominfo-targetkan-layanan-4g-di-12548-desa](https://www.antaraneews.com/berita/1676494/mudahkan-pjj-kemenkominfo-targetkan-layanan-4g-di-12548-desa)



Seorang anak berlari membawa Bendera Merah Putih. Ia berjuang membawa bendera agar sampai ke tujuan.

17^{an} Masyarakat

Masyarakat yang hadir pada perlombaan 17an mengheningkan cipta saat Peringatan ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI





Lomba gowes sepeda hias dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam rangka Peayaan HUT RI ke 75



Para pemuda ikut serta lomba makan kerupuk dalam rangka HUT RI ke 75



Masyarakat tetap semangat lomba tarik tambang di tengah pandemi



Masyarakat pada perayaan HUT RI ke 75 dengan tetap malakukan protokol kesehatan



(Atas) Menkominfo, Johnny G. Plate berfoto bersama Panitia Lomba Membaca Puisi Tingkat SD dan SMP Se-Indonesia yang bertemakan Berkibarlah Merah Putih “Aku Cinta Negeri Indonesia Maju”, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo RI, Jakarta

Lomba Membaca Puisi “ Aku Cinta Negeri Indonesia Maju “

(Bawah) Sekjen Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti memberikan sambutan pada acara Lomba Membaca Puisi yang bertemakan Berkibarlah Merah Putih “Aku Cinta Negeri Indonesia Maju” Tingkat SD dan SMP Se-Indonesia yang dilaksanakan secara Virtual dari Ruang Serbaguna Kemkominfo RI, Jakarta, Selasa (18/8/2020)



Para peserta Lomba Membaca Puisi yang bertemakan Berkibarlah Merah Putih "Aku Cinta Negeri Indonesia Maju" Tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 200 pelajar dari SD dan SMP yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Serbaguna Kemkominfo RI, Jakarta, Selasa (18/8/2020)



Tiga orang Tim Juri Lomba sedang memberikan penilaian langsung kepada peserta Lomba Membaca Puisi yang bertemakan Berkibarlah Merah Putih "Aku Cinta Negeri Indonesia Maju" yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Serbaguna Kemkominfo RI, Jakarta, Selasa (18/8/2020)



Tim Juri Lomba Membaca Puisi Aku Cinta Negeri Indonesia Maju Tingkat SD dan SMP, kiri – kanan : Ester Pantau, Atiek Anwar, dan Justak Hanto



Salah seorang peserta Lomba Membaca Puisi Aku Cinta Negeri Indonesia Maju dari Tingkat SMP yang berasal Biak Numfor, Propinsi Papua



Founding Father PB Perkemi, Indra Kartasmita, Ketua Umum Perkemi, Saifuddin Aswari Rivai berfoto bersama pengurus PB Perkemi, Wasit, dan Dojo Kominfo usai Pembukaan Kejurnas "Tandoku Virtual Shorinji Kempo" memperebutkan Piala Bergilir Menteri Kominfo, yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2020, di Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Kamis (13/8/2020)



Kejuaraan Nasional Tandoku Virtual Shorinji Kempo

Menkominfo, Johnny G. Plate memberikan sambutan sekaligus membuka secara langsung Kejurnas "Tandoku Virtual Shorinji Kempo" dalam rangka memperebutkan Piala Bergilir Menteri Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2020, di Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Kamis (13/8/2020)



Kontingen				Emas	Perak	Perunggu	Kontingen				Emas	Perak	Perunggu
1. Bali	2	1	1	0	0	0	18. Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
2. Hoyt KOMINFO	2	0	1	0	0	0	19. Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
3. Kalimantan Timur	1	1	1	0	0	0	20. Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
4. Jawa Barat	1	0	2	0	0	0	21. Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
5. Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	0	0	22. Lampung	0	0	0	0	0	0
6. Nusa Tenggara Timur	0	4	0	0	0	0	23. Maluku	0	0	0	0	0	0
7. Sumatera Barat	0	1	0	0	0	0	24. Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
8. DKI Jakarta	0	0	1	0	0	0	25. Papua	0	0	0	0	0	0
9. Jawa Tengah	0	0	1	0	0	0	26. Papua Barat	0	0	0	0	0	0
10. Aceh	0	0	0	0	0	0	27. Riau	0	0	0	0	0	0
11. Banten	0	0	0	0	0	0	28. Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
12. Bengkulu	0	0	0	0	0	0	29. Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0
13. DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	30. Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
14. Gorontalo	0	0	0	0	0	0	31. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
15. Irian Jaya	0	0	0	0	0	0	32. Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	33. Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	34. Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0



Upacara Peringatan ke- 75 Kemerdekaan RI

Menkominfo, Johnny G. Plate beserta Jajaran Eselon I di Lingkungan Kementerian Kominfo saat mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang digelar di halaman Istana Merdeka secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Senin (17/8/2020)



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate beserta Jajaran Eselon I di Lingkungan Kementerian Kominfo berfoto bersama usai Mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang digelar di halaman Istana Merdeka secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Senin (17/8/2020)



Upacara Peringatan ke-75
Detik-Detik Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia



Istana Presiden



Ruang Serbaguna Kemkominfo

Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih pada Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75 yang digelar di halaman Istana Merdeka yang diikuti oleh Menkominfo beserta Jajaran Eselon I di Lingkungan Kemkominfo dari Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, dan peserta upacara lainnya secara virtual, Senin (17/8/2020)





Menkominfo, Johnny G. Plate melakukan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dengan khidmat pada Upacara Bendera 17 Agustus 2020 yang digelar di halaman Istana Merdeka secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Senin (17/8/2020)



Tandoku Shorinji Kempo Virtual

Terobosan Baru di tengah Pandemi

Rangkaian peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dimeraikan dengan Kejuaraan Nasional Tandoku Shorinji Kempo Piala Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2020. Gelaran cabang olahraga yang pertama di Indonesia secara virtual itu berlangsung selama dua hari dari tanggal 13 s.d. 14 Agustus 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pandemi COVID-19 membuat perhelatan Shorinji Kempo tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kejuaraan virtual ini menjadi penanda kebangkitan semangat Indonesia Maju untuk adaptasi kebiasaan baru dan percepatan transformasi digital di sektor olahraga.

"Semua peserta perwakilan daerah menampilkan seni bela diri Kempo secara virtual. Meski demikian, esensi dalam menjaga kebugaran tubuh dan sportivitas dalam bertanding tetap terjaga dalam penyelenggaraan pertandingan ini," ujarnya saat membuka Kejurnas Virtual Tandoku Shorinji Kempo dari Aula Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (13/08/2020).

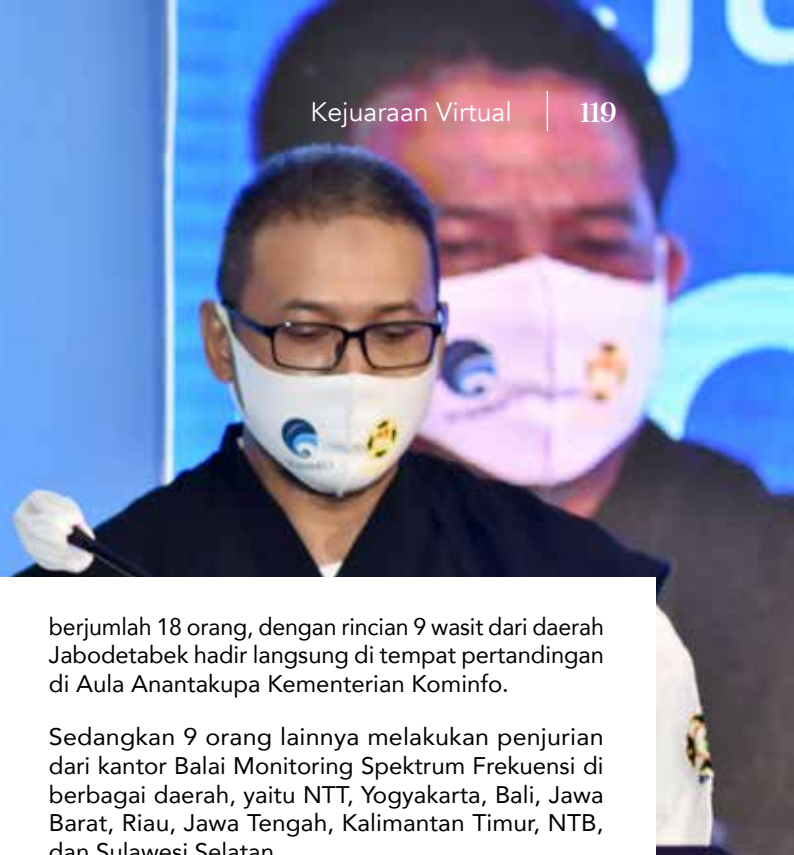
Dalam kesempatan yang sama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memberikan dukungan dan apresiasi atas cabang olahraga Shorinji Kempo agar dapat dipertandingkan di tingkat internasional mulai di SEA Games hingga ke Olimpiade.

"Kemenpora siap mendukung apa yang diperlukan. Kempo harus berjuang keras bagaimana supaya stabil dipertandingkan di setiap kegiatan SEA Games, dan kalau bisa menjadi cabang yang dipertandingkan di Asian Games hingga ke Olimpiade.," ujarnya ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Kejurnas Virtual Tandoku Shorinji Kempo dari Aula Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Menpora menilai, jika Kempo dapat dipertandingkan di beberapa kejuaraan internasional, maka akan banyak medali yang bisa dipersembahkan untuk Merah-Putih pada ajang tersebut. "Pasti akan banyak medali yang akan disumbangkan. Ini harapan kita agar nantinya kejuaraan Kempo bisa dihelat setiap tiga bulan sekali. Apa yang dibutuhkan dari pemerintah, selalu akan kita support apalagi Menkominfo akan menjadi ketua dewan kehormatannya," ungkapnya.

Semangat Untuk Indonesia Maju

Sebelumnya, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief menyampaikan, kejurnas virtual bertujuan menularkan semangat untuk tetap meraih prestasi dengan segala keterbatasan selama masa pandemi COVID-19, dan sekaligus tentunya agar tetap kreatif berbagi berbagai terobosan-terobosan yang mampu membangkitkan semangat



juang untuk Indonesia Maju. "Kominfo merangkumnya dalam tema penyelenggaraan "Meraih Prestasi di Masa Pandemi untuk Indonesia Maju," jelasnya.

Dojo Kementerian Kominfo terhitung masih berusia belia karena baru bergabung dengan PB. Perkemi pada tanggal 3 Januari 2020. "Namun memiliki semangat agar Kementerian Kominfo tetap dapat ikut serta memeriahkan peringatan HUT RI yang ke 75 walau dalam keadaan terbatas di masa pandemi COVID-19," ungkapnya.

Menurut Direktur Anang Latief, Kejuaraan Nasional Tandoku virtual Shorinji Kempo juga ditargetkan untuk memberikan semangat berprestasi di masa pandemi bagi Insan Kominfo dan komunitas beladiri Shorinji Kempo di seluruh Indonesia.

"Yang ketiga, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui olahraga bela diri ini. Dan keempat, sebagai sarana mempromosikan Kementerian Kominfo melalui cabang olahraga beladiri Shorinji Kempo," paparnya.

Dirut BAKTI menambahkan, Shorinji Kempo merupakan kegiatan bela diri dan olahraga di Kominfo yang bertujuan untuk menyalurkan aktivitas positif, menjaga kesehatan, dan menjadi sarana pembentukan mental dan karakter karyawan. "Khususnya bagi petugas security di Kementerian tempatnya bekerja," tuturnya.

Penjurian Virtual dari 9 Wilayah

Pertandingan Kempo dalam Kejuaraan Nasional virtual ini akan dipimpin oleh Wasit dan Koordinator yang

berjumlah 18 orang, dengan rincian 9 wasit dari daerah Jabodetabek hadir langsung di tempat pertandingan di Aula Anantakupa Kementerian Kominfo.

Sedangkan 9 orang lainnya melakukan penjurian dari kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi di berbagai daerah, yaitu NTT, Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

"Sementara untuk sistem penilaian, pencatatan, dan penyajian data, akan disampaikan secara elektronik. Mengenai protokol kesehatan COVID-19, selama persiapan dan pertandingan, kami tetap memberlakukan disiplin protokol COVID-19, yaitu melakukan penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu, menggunakan masker, dan physical distancing," urainya.

Direktur Anang menyatakan, Kejurnas Kempo secara daring ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya memilih teknik Tandoku untuk dipertandingkan.

"Tandoku adalah gerakan dasar mandiri Kihon dan Ken yang meliputi teknik dan jurus memukul, menendang, melipat, membanting dan mengunci lawan. Dengan begitu, Kejurnas Kempo kali ini tetap menjalankan protokol COVID-19 yang mengharuskan tidak ada kontak fisik," tandasnya.

Kontingen Bali Rebut Juara Umum

Kontingen Shorinji Kempo Provinsi Bali berhasil merebut gelar Juara Umum dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tandoku Shorinji Kempo Piala Menkominfo Tahun 2020 ini.

Gelar juara umum berhak disandang Kontingen Kempo Bali setelah merebut dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Dua medali emas masing-masing diraih Kenshi Griselda Nadya Billy pada kategori Yudhansa II/III DAN Putri, dan Erasmus Naris Fendi di kelas Yudhansa I DAN Putra. Medali perak untuk Yudhansa II/III DAN diperoleh Rudy Sihalo, dan sekeping perunggu Tandoku Kyukenshi Putri disumbang oleh Ni Kadek Ayu Juniantari. (hm.ys)

Lindungi Data Pribadi, Jangan Pasang Aplikasi Sembarangan!

Kementerian Kominfo mengimbau generasi muda untuk selektif dalam memasang aplikasi yang digunakan di gawai. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abriyani Pangerapan, hal itu sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dalam dunia digital.

“Fakta di lapangan menunjukkan, 93% netizen mengumbar data pribadi mereka di dunia digital. 44% lainnya membagikan data-data tersebut kepada publik dan bahkan 21% membagikan data secara sukarela kepada orang yang tidak dikenal. Kita harus mengerti kalau kita download produk ataupun aplikasi, bagaimana ia mengelola data-data kita,” ujar Dirjen Semuel dalam Webminar PDP: Melindungi Data Pribadi Bagi Generasi Z dan Millennial, dari Jakarta, Sabtu (01/08/2020).



Bangun Semangat Pelajar, Kominfo Gelar Lomba Baca Puisi

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Paduan Suara Merah Putih menggelar Lomba Membaca Puisi Aku Cinta Negeri Indonesia Maju Tingkat SD dan SMP. Lomba yang berlangsung virtual itu diikuti oleh 200 pelajar SD dan SMP dari seluruh Indonesia. Mengenakan pakaian adat dan seragam sekolah, para peserta membacakan puisi dari rumah menggunakan gawai masing-masing.

“Kalian adalah masa depan Indonesia. Anak-anakku bisa belajar melalui virtual, melalui internet dan kegiatan ini pun juga melalui virtual. Karena itu, tentunya puisi itu betul-betul kalau kita rasakan bisa memberikan semangat pada anak-anakku semua,” ujarnya saat membuka lomba baca puisi dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (18/08/2020).

FMB9 Media Klarifikasi Pemerintah dalam Penanganan COVID-19

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dapat menjadi medium komunikasi yang ampuh untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sehingga, pesan yang disebarkan dapat berdampak positif kepada masyarakat di tengah masih mewabahnya virus.

“Forum ini mengklarifikasi berbagai informasi sehingga media mendapatkan informasi cepat, akurat, dan terpercaya. Supaya apa yang sudah kita kerjakan selama ini betul-betul berdampak menyelamatkan masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Widodo Muktiyo, saat membuka Diskusi Media FMB9 bertajuk “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit”, Sabtu (15/08/2020).

Tandoku Shorinji Kempo Virtual

Terobosan Baru di tengah Pandemi



Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memberikan dukungan dan apresiasi atas cabang olahraga Shorinji Kempo agar dapat dipertandingkan di tingkat internasional mulai di SEA Games hingga ke Olimpiade. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Kejurnas Virtual Tandoku Shorinji Kempo dari Aula Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Sebelumnya, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief menyampaikan, kejurnas virtual ini bertujuan menularkan semangat untuk tetap meraih prestasi dengan segala keterbatasan selama masa pandemi COVID-19, dan sekaligus tentunya agar tetap kreatif berbagi berbagai terobosan-terobosan yang mampu membangkitkan semangat juang untuk Indonesia Maju.

Menkominfo: Infrastruktur Digital Kian Punya Peran

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menilai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan infrastruktur digital memiliki peran penting. Bahkan, jelang perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia perannya akan penting karena usia kemerdekaan dan kondisi pandemi COVID-19. "Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan digital akan memainkan perannya yang luar biasa pentingnya, untuk mendukung kemeriahan perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti," tutur Menteri Kominfo dalam Program Indonesia Bicara TVRI, Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Guna mensukseskan Upacara 17 Agustus secara virtual di Istana Negara, Menteri Kominfo mengatakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo bersama operator seluler menjamin bandwidth yang memadai.



KPI Dukung Kebijakan Digitalisasi Penyiaran untuk Kepentingan Publik



Digitalisasi penyiaran memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik secara mikro maupun makro. Secara mikro, masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang lebih baik dan konten beragam. Sementara secara makro, masyarakat diuntungkan dengan digital deviden yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha berbasis digital, termasuk industri kreatif.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, dalam Webinar Sosialisasi TV Digital dengan tema Indonesia Goes to Digital dari Jakarta, Rabu (12/08/2020).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia menyatakan, semua "aturan main" di dalam proses digitalisasi penyiaran telah disiapkan sehingga fair. "Seperti masalah tarif, penawaran, termasuk antara konten dan penyelenggara multiplexernya telah diatur," tegasnya.

Kominfo Dukung Kota Tegal jadi Living Lab Smart City

Kementerian Kominfo mendukung Pemerintah Kota Tegal dalam mewujudkan Living Lab Smart City. "Saya menyambut niat baik ini, saya tahu persis ini merupakan rencana yang sangat penting. Kita butuh langkah cepat atau extraordinary, kata Bapak Presiden, untuk membangun dan mempercepat pelaksanaan transformasi digital," kata Dirjen SDPPI Ismail saat menyambut kunjungan pejabat Pemerintah Kota Tegal, Kamis (06/08/2020).



Living Lab Smart City merupakan sebuah ekosistem yang mampu mendukung terwujudnya kerja sama antara pemerintah, komunitas, industri, pendidikan, dan masyarakat, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan melakukan perbaikan penerapan smart city dalam menyelesaikan permasalahan sebuah kota. Dirjen SDPPI meyakinkan Kemkominfo akan mempercepat proses ini, termasuk berkoordinasi dengan operator telekomunikasi.

Lewat Omnibus Law, Kominfo Dorong Percepatan Penyiaran Digital



Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiako menyatakan saat ini Kementerian Kominfo mendorong percepatan implementasi penyiaran digital. Keterlambatan penerapan penyiaran digital berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima negara. Oleh karena itu, Henri mengharapkan agar implementasi siaran digital bisa lebih cepat dengan pengesahan Omnibus Law.

"Terlambatnya Indonesia melakukan digitalisasi penyiaran ternyata telah menghilangkan potensi pemasukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Negara kehilangan potensi pendapatan hingga sepuluh triliun per bulan lantaran tertundanya digitalisasi ini," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema "RUU Penyiaran: Bagaimana Masa Depan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia?", Selasa (11/08/2020).

Dirjen Aptika:

Anak Muda Pewaris Startup Digital



Anak muda atau kaum milenial merupakan pewaris startup digital di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, hal itu dilihat dari dukungan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekosistem startup.

“Waktu pertama kali pemerintah mencanangkan pembangunan internet di Indonesia yang diajak siapa? Anak-anak muda,” tutur Dirjen Aptika dalam podcast Cakap Startup: Percakapan tentang Regulasi, Nyali dan Inovasi, ditayangkan lewat akun official Youtube Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dari Jakarta, Minggu (02/08/2020) malam.

Dirjen Samuel mengatakan, saat ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya di pemerintahan untuk mengajak anak muda melakukan transformasi digital. Sebab, dengan dibangunnya infrastruktur telekomunikasi juga perlu diimbangi dengan menyiapkan SDM atau talenta digital yang memiliki skill di bidang teknologi, juga dunia bisnis.

Kominfo: Peran orang Tua

Penting Dampingi Anak Saat Pakai Gawai

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan peran orang tua sangat penting di masa pandemi COVID-19 untuk mendampingi anak, baik saat sedang belajar jarak jauh maupun saat berada di rumah. Hal ini ia sampaikan dalam Webinar bertema “Pemenuhan Hak Anak dalam Mendapatkan Konten Berkualitas di Masa Pandemi COVID-19” dari Jakarta, Senin (03/08/2020).

Menurut Sekjen Niken, orang tua juga perlu menumbuhkan sikap kritis terhadap anak mengenai dampak negatif daripada gadget. “Peran orang tua sangat penting, di antaranya melakukan pendampingan sekaligus memberikan contoh ke anak. Mengarahkan anak untuk menggunakan gadget untuk hal yang positif,” kata Sekjen Niken.



Kominfo Data

& Sosialisasi Standar Telekomunikasi di Batam

Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo melakukan pendataan standar perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan di pusat-pusat pertokoan elektronik di wilayah Kota Batam. Para petugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Batam yang melakukan pendataan sekaligus melakukan Sosialisasi on the Spot mengenai standar perangkat telekomunikasi.

“Kegiatan sejak 27 hingga 30 Juli 2020 itu menyisir pusat perbelanjaan Nagoya Hill, Lucky Plaza, Dc Mall, Komplek Pertokoan Bumi Indah Nagoya, dan Baloi,” jelas Kepala Balai Monitor Kelas II Batam Abdul Salam, di Batam, Jumat (31/07/2020). Menurut Abdul Salam, dari hasil pemantauan masih ditemukan sejumlah gawai yang belum bersertifikat, seperti drone, wireless mouse, speaker bluetooth, jam tangan bluetooth dan lainnya.

Top 10 Hoaks Agustus 2020



FAKE NEWS

1 Virus Corona Sengaja Disebar oleh "3 Serangkai"

Beredar unggahan di media sosial Instagram bahwa virus Corona sengaja disebar oleh Dokter dengan narasi "ada 3 serangkai dalam penyebaran virus Corona. Mereka adalah dokter, nakes, dan apoteker. Mereka adalah lingkaran setan yang menyebabkan virus corona tidak kunjung hilang dari Indonesia".

Faktanya, dikutip dari Antaraneews.com klaim Virus Corona (COVID-19) sengaja disebar oleh dokter, tenaga medis dan apoteker adalah salah. Tidak ada satupun rujukan yang menunjukkan dokter, tenaga kesehatan dan apoteker di Indonesia terlibat dalam kasus penyebaran COVID-19. Sebaliknya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sudah ada 74 dokter meninggal dunia akibat terinfeksi Virus Corona maupun berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

2 Gedung Kejaksaan Terbakar, Menko Luhut Minta 'Pemutihan' Koruptor

Telah beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) meminta 'pemutihan' sejumlah koruptor pasca-terbakarnya gedung Kejaksaan Agung.

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa LBP meminta 'pemutihan' sejumlah koruptor pasca terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang menyatakan kebenaran klaim pada percakapan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan LBP.



3 Formulir Online Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar

Beredar sebuah informasi berisi tautan formulir online pendaftaran Kartu Indonesia Pintar di media sosial. Edaran informasi tersebut disertai narasi "Bagi yg punya putra putri, SD, SMP, SMA/K ingin mengajukan program Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar, silahkan mengisi link dibawah ini. Ditunggu sampai tanggal 25 Agustus 2020. Tks".

Faktanya, informasi mengenai formulir online yang beredar tersebut dibantah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui unggahan story pada akun Instagram resmi @kemdikbud.ri, Minggu, 23 Agustus 2020. Kemendikbud dalam unggahannya juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap formulir penipuan yang meminta data siswa tersebut.

5 Mahasiswa UNDIP Bayar Uang Pangkal Rp 87 Miliar

Beredar sebuah gambar tangkapan layar di media sosial Twitter berupa Kartu Tanda Pengumuman Jalur Seleksi UM Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2020. Dalam kartu tersebut, seseorang dinyatakan lolos dan diterima di program studi Ilmu Hukum S1 Undip dengan uang pangkal sebesar Rp 87.000.000.000.

Rektor Undip Yos Johan Utama menyatakan bahwa hal itu tidak benar alias bohong. Merujuk pada tribunnews.com yang melansir dari laman um.undip.ac.id, diketahui bahwa UNDIP tidak pernah mengeluarkan *passing grade* program studi di lingkungan Universitas. Disebutkan juga panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNDIP mengingatkan kepada seluruh calon pendaftar untuk waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Panitia. Adapun pembayaran Biaya Pendidikan Undip hanya melalui sistem *host to host* (tidak menggunakan nomor rekening) di bank-bank. Selanjutnya diketahui biaya SPI termahal di UNDIP adalah pada program studi Kedokteran yang mencapai Rp 200-250 juta, sementara untuk jurusan Hukum senilai Rp 40-50 Juta.



4 Virus Corona Dibuat di Lab Militer Partai Komunis China

Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat klaim bahwa Virus Corona penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, dibuat di laboratorium militer Partai Komunis China (PKC). Klaim tersebut diungkapkan oleh ilmuwan asal China yang melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu bernama Li Meng Yan.

Dilansir dari laman situs Tempo.co, klaim bahwa COVID-19 dibuat di laboratorium militer Partai Komunis China adalah keliru. Hingga kini, tidak ada bukti bahwa Virus Corona COVID-19 merupakan buatan laboratorium. Bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa virus itu berevolusi secara alami dan menular ke manusia dari hewan. Tidak ada pula tanda-tanda manipulasi pada data genom SARS-CoV-2 yang menunjukkan bahwa virus tersebut merupakan hasil rekayasa laboratorium.

6 Anjuran WHO Tidak Menggunakan Masker Selama Pandemi

Beredar sebuah dokumen di media sosial yang diklaim merupakan dokumen resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO melalui dokumen tersebut merekomendasikan atau menganjurkan untuk tidak menggunakan masker selama pandemi COVID-19. Rekomendasi itu dibuat karena masker tidak terbukti efektif melindungi diri dari COVID-19.

Faktanya, dikutip dari [Factcheck.afp.com](https://factcheck.afp.com) dokumen yang diklaim berasal dari WHO berisi rekomendasi untuk tidak mengenakan masker di tengah pandemi COVID-19 adalah tidak benar. WHO melalui juru bicaranya, Margaret Harris mengatakan dokumen yang beredar di media sosial itu bukan dokumen WHO. WHO dan sejumlah badan kesehatan lainnya justru sangat merekomendasikan penggunaan masker untuk membantu melindungi diri dari Virus Corona baru (COVID-19).



7

Grup WhatsApp COVID-19 Catut Nama WHO CS

Beredar unggahan di media sosial berupa tangkapan layar grup WhatsApp bernama "Info Seputar COVID-19". Grup tersebut terlihat menjanjikan lantaran mencatut nama organisasi PBB seperti WHO, UNICEF, dan UNDP.

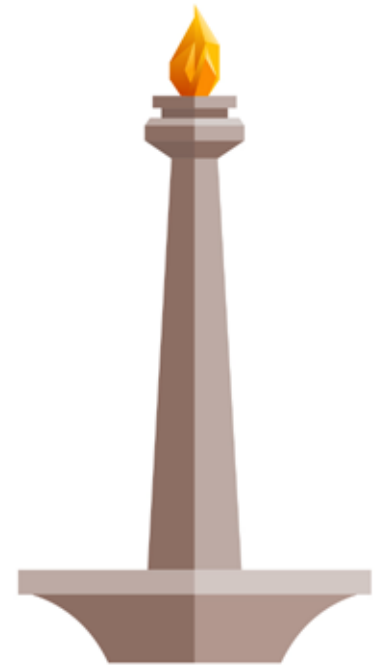
Setelah ditelusuri, menurut [Liputan6.com](https://liputan6.com), grup tersebut adalah palsu untuk mengincar nomor WhatsApp target, lalu menjalankan aksi peretasan dengan meminta kode OTP. Praktik seperti ini sering ditemukan pada kasus penipuan dengan teknik rekayasa sosial (social engineering), yang memanfaatkan kelalaian target dan meminta sejumlah uang kepada kontak pemilik asli nomor ponsel tersebut. Selama beberapa bulan terakhir para penipu mengeksploitasi isu COVID-19 melalui beragam cara. Menurut laporan perusahaan keamanan siber Kaspersky, beragam topik yang dieksploitasi oleh penipu siber termasuk isu vaksin COVID-19, donasi dan sumbangan, aplikasi pelacakan kontak, alat medis dan beberapa topik lainnya.



8 Video Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam COVID-19

Beredar di media sosial sebuah video dengan logo Badan Intelijen Negara (BIN) disertai tulisan "Kondisi COVID-19 di DKI Jakarta". Video itu menampilkan data yang dimulai pada 5 Maret 2020 dimana peta masih berwarna putih. Kemudian pada 28 Maret peta mulai berwarna cream menuju oranye. Pada 4 Mei 2020, seluruh peta berwarna merah cerah. Kemudian pada 17 Mei 2020, peta berubah menjadi merah tua. Sedangkan pada 28 Juli sampai 9 Agustus 2020, peta DKI Jakarta telah berwarna hitam.

Faktanya, Deputi-VII Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto menegaskan, data yang mengatasnamakan BIN tersebut adalah hoaks. Wawan menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari BIN. Selanjutnya dilansir dari news.detik.com, jika dilihat peta persebaran COVID-19 secara nasional, peta DKI Jakarta tidak terlihat berwarna hitam. Secara keseluruhan peta persebaran Corona juga tidak menampilkan satu daerah pun yang berwarna hitam.



9

Beredar sebuah unggahan di sejumlah platform media sosial yang mengklaim bahwa anak-anak yang diberi vaksin flu lebih rentan terhadap infeksi Virus Corona. Informasi itu disebut-sebut merupakan hasil penelitian yang dimuat dalam sebuah makalah.

Vaksin Flu Membuat Anak-anak Lebih Rentan terhadap Infeksi Virus Corona

Faktanya, dikutip dari factcheck.afp.com klaim vaksin flu membuat anak-anak lebih rentan terkena infeksi Virus Corona adalah tidak benar. Tidak ditemukan bukti bahwa vaksin flu meningkatkan resiko tertular Virus Corona. Berdasarkan hasil penelitian Danuta Skowronski, seorang peneliti di British Columbia Center for Disease Control (BCCDC), vaksin flu tidak mempengaruhi resiko terkena Virus Corona. Pejabat kesehatan Amerika bahkan merekomendasikan untuk memberikan vaksin flu kepada anak-anak selama pandemi COVID-19.

10

Beredar unggahan di sosial media Facebook dengan narasi yang menyebutkan penukaran uang pecahan edisi khusus Rp75 ribu untuk membayar utang negara. Pemerintah dinarasikan sedang mengambil uang rakyat dengan menukar uang pecahan baru yang tidak bisa digunakan sebagai alat tukar.

Penukaran Uang Pecahan Rp75 Ribu untuk Bayar Utang Negara

Setelah ditelusuri, klaim uang pecahan baru Rp75 ribu untuk membayar utang negara adalah salah. Faktanya, uang tersebut diterbitkan sebagai edisi khusus HUT ke 75 Republik Indonesia dan sah sebagai alat pembayaran. Dilansir dari Okezone.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, penerbitan mata uang baru Rp75 ribu bukan dicetak untuk beredar bebas di masyarakat dan bukan sebagai tambahan likuiditas pelaksanaan penukaran kegiatan ekonomi. Karena dicetak terbatas hanya 75 juta lembar, masing-masing masyarakat hanya diberi jatah penukaran sebanyak satu lembar. Penukaran bisa diajukan lewat mengisi data diri di situs.pintar.bi.go.id.



LITERASI PEREMPUAN

Apa itu *Cyberbullying* dan Bagaimana Mengajari Anak Menghindarinya?

Hai Sisters! Dalam rangka Hari Ibu, Sisternet ingin mengingatkan kepada semua ibu tentang bahaya *cyberbullying*, nih. Karena sekarang ini hampir semua orang punya media sosial, dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak sekalipun sudah mahir menggunakannya. Jika anakmu termasuk yang aktif menggunakan media sosial, sebaiknya terus perhatikan dan pantau mereka dalam menggunakan akun media sosialnya, ya. Pasalnya, saat ini banyak yang menyalahgunakan media sosial. Sehingga tak sedikit anak-anak dan remaja jadi sasaran *cyberbullying*. Sebagai orangtua, pasti kamu sangat cemas dan tak terima jika anakmu mengalami hal tersebut, kan?

Contoh *cyberbullying* yang pernah terjadi adalah kasus pada Amanda Todd. Remaja asal Kanada itu memilih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mendapat *bully*. Amanda Todd diteror dan diancam secara terus menerus dengan cara menyebarluaskan foto-foto pribadi, saat remaja itu terpengaruh ajakan seseorang yang baru dikenalnya lewat dunia maya untuk berfoto dewasa.

Lalu, apakah sih sebenarnya *cyberbullying* itu?

Cyberbullying merupakan bentuk tindak kejahatan atau perlakuan kasar yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang kepada orang lain dengan menggunakan perantara media elektronik atau media online.

Tak hanya dalam ranah dunia maya, efek *cyberbullying* juga akhirnya merambat ke dunia nyata hingga ke lingkungan sekolah dan keluarga yang akhirnya menjadi tekanan dan memberi dampak depresi.

Mengapa *cyberbullying* bisa terjadi?

Pada umumnya, korban yang mengalami *cyberbullying* adalah remaja. Saat ini jarang sekali kamu bisa menemukan remaja yang tidak memiliki akun jejaring sosial, bahkan sejak mereka bayi mungkin sudah dibuatkan.

Usia remaja biasanya terjadi krisis identitas dan lebih menyukai lingkungan di luar keluarga. Banyak ingin tahu dan mudah terpengaruh oleh tren masa kini, seperti berfoto selfie dan mem-posting harta benda untuk menarik perhatian orang lain. Ketahuilah, hal ini menjadi cikal bakal *cyberbullying*, terutama pada anak yang masih mudah dipengaruhi.

Bagaimana upaya pencegahan *Cyberbullying*?

Melarang anak untuk tidak memiliki akun jejaring sosial mungkin akan sangat sulit, terlebih kita juga tidak dapat menutup mata bahwa saat ini jejaring sosial juga menjadi sebuah wadah untuk mempermudah komunikasi antar keluarga, dan teman-teman di sekolah.

Oleh karena itu, kamu harus memberikan pengawasan dan aturan-aturan saat anak ingin bermain jejaring sosial dan mem-posting foto-fotonya. Namun jika anak sudah terlanjur menjadi korban *cyberbullying*,

kamu harus bantu mengatasinya agar anak tidak menjadi depresi dan mengambil tindakan yang berbahaya, Sisters. Jangan pernah menambahkan kesalahan anak dengan ikut menyalahkannya. Percayalah, hal ini sama sekali tidak menolongnya.



Lalu, bagaimana orangtua harus bersikap ketika terjadi *cyberbullying* pada anak?

1. Tak perlu menanggapi pelaku

Berikan pengertian pada si kecil bahwa hal utama yang harus dilakukan ketika kekerasan di media sosial terjadi padanya adalah tidak membalas atau menanggapi si pelaku. Beri tahu bahwa semua komentar negatif atau cercaan yang ditujukan pada dirinya sebaiknya diabaikan saja, Sisters.

Meski memang sangat sulit untuk menahan diri agar tidak melawan, justru hal ini akan mencegah keadaan semakin buruk. Biasanya orang yang melakukan *cyberbullying* cenderung lebih senang jika 'umpannya' diterima oleh sang korban.

2. Bangun kembali kepercayaan diri anak

Sangat wajar jika anak dan remaja sangat ketakutan, cemas, marah, dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Tentu sebagai orangtua, peranmu untuk membuatnya tenang dan mengembalikan kepercayaan dirinya kembali sangat penting, Sisters.

Jelaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi pada siapa pun. Ada banyak orang yang tak bertanggung jawab dan menggunakan media sosial untuk menindas orang lain. Jika memang perlu, kamu bisa mengajak si kecil ke psikolog untuk memantau kondisi mentalnya.

Penting untuk tidak menyudutkan atau menyalahkan anak, misalnya dengan berkata seperti, "Memangnya apa yang kamu lakukan, sampai-sampai dia mem-bully kamu seperti ini?". Apa pun alasannya, *cyberbullying* pada anak tidak bisa dibenarkan, Sisters.

3. Kumpulkan bukti, lalu laporkan

Setelah berhasil menahan diri, tanyakan si kecil apa saja bentuk kekerasan media sosial yang ia dapatkan. Entah itu komentar yang tidak pantas, foto pribadinya, dan lain-lain. Kumpulkan semua hal tersebut untuk dijadikan barang bukti, Sisters.

Banyak anak yang justru menghapus semua bukti tersebut karena merasa

ketakutan. Jadi tenangkan dirinya dan berikan penjelasan bahwa hal ini bisa dijadikan barang bukti. Jika memang kamu sudah memiliki bukti yang cukup, maka sebaiknya laporkan pada pihak sekolah atau pihak manapun yang berwenang dalam situasimu, sehingga si pelaku tidak akan melakukan kekerasan pada anak lainnya.

Hal yang terpenting adalah memantau segala kegiatan si kecil dalam media sosial. Ketahui apa saja akun media sosial yang ia miliki hingga teman-temannya di dalam media tersebut. Beritahukan ia jika sebaiknya tidak berteman dengan orang-orang yang tidak dikenal olehnya. Penting juga untuk mengetahui segala postingan yang ia unggah di akun pribadinya.

Sanksi hukum terhadap pelaku *cyber-bullying*

Nah, melihat dari bagaimana hal itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:

Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Mengingat ada pasal yang bisa menjerat pelaku bullying, berarti kasus tersebut memang tidak bisa dipandang sebelah mata, ya, Sisters. Untuk itu, jika kamu mengetahui ada dugaan tindak bullying kamu bisa melaporkannya kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Semoga anak-anak kita dijauhkan dari apapun bentuk bullying ya, Sisters, dan Selamat Hari Ibu untuk para Ibu di seluruh Indonesia!



17 AGUSTUS 2020

DIRGAHAYU INDONESIA



INDONESIA
MAJU



“

Selama 74 tahun, perayaan meriah yang disaksikan di Istana Merdeka kali ini dirayakan melalui ruang digital. Kemeriahan tetap sama, khusuk dan khidmat. Cara kita merayakannya yang berbeda.

Presiden menekankan, perayaan tetap dengan semangat optimisme, kita harus bangkit, kita harus bangun untuk Indonesia yang lebih maju.



Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika RI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id